



**PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan oleh:

Adela Septiani Simbolon

0221 18 207

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**



**PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardianyanto, Ak., MBA,
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

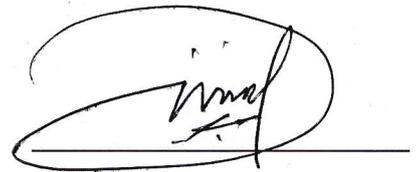
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Jumat, 01 Juli 2022

Adela Septiani Simbolon
0221 18 207

Disetujui,

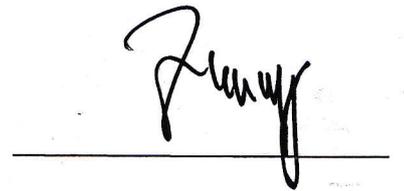
Ketua Penguji Sidang :
Ketut Sunarta, Ak., MM, CA., PIA



Ketua Komisi Pembimbing :
Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA.,
CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA



Anggota Komisi Pembimbing :
Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak.



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adela Septiani Simbolon
NPM : 022118207
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Government Governance* terhadap
Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan,

Bogor Mei 2022



Adela Septiani Simbolon

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pakuan, tahun 2022**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

ADELA SEPTIANI SIMBOLON, 022118207, Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan ERNADHI SUDARMANTO dan ASEP ALIPUDIN, 2022.

Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik atau sebagai wujud penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi dan pasar efisien, pencegahan korupsi baik secara politik ataupun administrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan usaha. Kinerja Organisasi merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan program kerja atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan dalam suatu organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *Good Government Governance* terhadap kinerja organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Populasi dalam penelitian ini pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dengan teknik *purposive sampling* sehingga didapatkan sebanyak 52 pegawai. Metode penelitian ini adalah verifikatif dengan metode *explanatory survey*. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 26.0 dengan menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi sederhana dan uji hipotesis yaitu uji koefisien uji T, uji R Square dan Uji F.

Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil bahwa *Good Government Governance* berpengaruh secara positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *Good Government Governance* maka Kinerja Organisasi juga akan semakin baik. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat memperbaiki dengan meningkatkan aktivitas-aktivitas yang berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat banyak.

Kata Kunci : *Good Government Governance*, Kinerja Organisasi.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor”. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Yang paling saya sayangi yaitu Ibu saya yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungan, saran dan juga bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc Selaku Wakil Dekan II Bidang SDM dan Keuangan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA.,CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE, CFrA, CA, QIA., CGCAE., ASEAN CPA selaku Ketua Komisi Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Bapak Asep Alipudin, S.E., M.Ak selaku Anggota Komisi Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
7. Kepada Keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dukungan.
8. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam proses penelitian, memberikan data hingga proses penyebaran kuesioner.
9. Kepada Teman – teman di Universitas Pakuan yaitu Rika Widiawati, Ramdiani, Nadya Solihati, Gita Melania, Hayati Nufus, Layla Nurul Hanifah dan teman – teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menemani dan menghibur selama penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
10. Kepada teman – teman seperjuangan Kelas C Akuntansi angkatan 2018 yang selalu memberi dukungan , doa serta senantiasa memberikan motivasi semangat dalam bertukar pikiran selama pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada Sahabat saya tersayang Yerika Mulianti dan Febrilda Putri yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, saran dan juga selalu membantu serta

mendukung saya dalam keadaan apapun.

12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Akuntansi Periode 2018/2019 dan 2019/2020 yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Ama yang selalu mendoakan saya, mendukung saya, memberikan semangat saat proses pengerjaan skripsi, kesabaran, motivasi dan selalu menemani saya di titik terendah saya.
14. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan untuk pendidikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga jerih payah dan pengajaran Bapak serta Ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Bogor, 15 Mei 2021

Penulis

Adela Septiani Simbolon

DAFTAR ISI

COVER PROPOSAL PENELITIAN	ix
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Bagi Mahasiswa.....	7
1.4.2. Bagi Instansi	7
1.4.3. Bagi Akademis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. <i>Good Government Governance</i>	8
2.1.1. Tujuan <i>Good Government Governance</i>	9
2.1.2. Manfaat <i>Good Government Governance</i>	10
2.1.3. Prinsip-prinsip <i>Good Government Governance</i>	10
2.2. Kinerja Organisasi Sektor Publik	13
2.2.1. Pengertian Kinerja.....	13
2.2.2. Kinerja Organisasi Sektor Publik	14
2.2.3. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik	15
2.2.4. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja	15

2.2.5.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	16
2.2.6.	Indikator Kinerja Organisasi	16
2.3.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	18
2.3.1.	Penelitian Sebelumnya.....	18
2.3.2.	Kerangka Pemikiran	27
2.4.	Hipotesis Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1.	Jenis Penelitian	30
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	30
3.2.1.	Objek Penelitian.....	30
3.2.2.	Unit Analisis	30
3.2.3.	Lokasi Penelitian	30
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
3.3.1.	Jenis data	31
3.3.2.	Sumber Data Penelitian.....	31
3.4.	Operasionalisasi Variabel.....	31
3.5.	Metode Penarikan Sampel.....	33
3.6.	Metode Pengumpulan Data	33
3.6.1.	Data Primer	33
3.6.2.	Data Sekunder	34
3.7.	Uji Kualitas Data	35
3.7.1.	Uji Validitas	35
3.7.2.	Uji Reliabilitas	35
3.8.	Metode Pengolahan Data/Analisis Data	36
3.8.1.	Analisis Deskriptif.....	36
3.8.2.	Uji Asumsi Klasik	36
3.8.3.	Analisis Regresi Linear Sederhana	37
3.9.	Pengujian Hipotesis.....	38
3.9.1.	Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)	38
3.9.2.	R-Squared (R^2)	39
3.9.3.	Penetapan Tingkat Signifikansi.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN		40
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor	40
4.1.2	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.....	41

4.1.3	Struktur Organisasi	41
4.2	Hasil Pengumpulan Data	43
4.2.1	Karakteristik Profil Responden.....	43
4.2.2	Hasil Uji Analisis Deskriptif	46
4.2.3	Distribusi Jawaban Responden	47
4.3	Analisis Data	52
4.3.1	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	52
4.3.2	Uji Asumsi Klasik	55
4.3.3	Analisis Regresi Linear Sederhana	58
4.3.4	Uji Hipotesis	59
4.4	Pembahasan	62
4.4.1	Pelaksanaan <i>Good Government Governance</i> Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor	62
4.4.2	Pelaksanaan Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.	64
4.4.3	Pengaruh <i>Good Government Governance</i> Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		72
DAFTAR LAMPIRAN.....		74

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Penelitian Sebelumnya.....	18
Table 3.1 Operasionalisasi Variabel Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.....	32
Table 3. 2 Skala Likert	34
Table 3. 3 Tingkat Realibilitas	36
Table 4. 1 Data Penelitian	43
Table 4. 2 Jenis Kelamin Responden	44
Table 4. 3 Umur Responden.....	44
Table 4. 4 Pendidikan Responden	45
Table 4. 5 Lama Bekerja	45
Table 4. 6 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	46
Table 4. 7 Instrumen Skala Likert.....	47
Table 4. 8 Mutu Kelas Interval	48
Table 4. 9 Good Government Governance (X).....	48
Table 4. 10 Kinerja Organisasi (Y)	50
Table 4. 11 Hasil Uji Validitas Good Government Governance (X).....	53
Table 4. 12 Hasil Uji Validitas Kinerja Organisasi (Y)	54
Table 4. 13 Hasil Uji Realibilitas Variabel Good Government Governance (X)	55
Table 4. 14 Hasil Uji Realibilitas Variabel Kinerja Organisasi (Y)	55
Table 4. 15 Hasil Uji Normalitas Analisis Statistik	57
Table 4. 16 Persamaan Regresi Linier Sederhana.....	59
Table 4. 17 Hasil Uji Parsial (Uji – t)	60
Table 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	61
Table 4. 19 Hasil Uji Simultan (Uji – f).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4. 1 Letak Geografis Kabupaten Bogor.....	40
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor	43
Gambar 4. 3 Hasil Uji Normalitas Analisis Grafik	56
Gambar 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	74
Lampiran 2 Jawaban Persetujuan Penelitian.....	76
Lampiran 3 Surat Izin Penyebaran Kuesioner	77
Lampiran 4 Surat Jawaban Penyebaran Kuesioner	78
Lampiran 5 Angket Penelitian	79
Lampiran 6 Tabulasi Data.....	81
Lampiran 7 HASIL UJI SPSS.....	84
Lampiran 8 Dokumentasi Penyebaran Kuesioner pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu mengenai kinerja pegawai pemerintah menjadi sorotan publik sebelum adanya *Coronavirus Disease – 19* (Covid – 19). Kinerja sektor publik sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia yang menuntut kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan dengan baik dan juga dapat mengelola pemerintahan dengan tepat serta dapat memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan akuntabel. Melalui tata kelola pemerintah yang baik dapat memberikan hasil dan kinerja yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mahsun dalam (Claudya, 2020) kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan program kerja atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan dalam suatu organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi. Dalam organisasi sektor publik, kinerja dapat diukur melalui elemen – elemen aparatur pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dan profesional dalam mencapai kinerja yang baik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pada organisasi publik, pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good government governance*.

Good government governance atau yang sering dikenal dengan sebutan *good governance* merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dimaksudkan bahwa pemerintah mampu untuk mengelola dan melaksanakan tugas pemerintahannya dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*. Untuk melaksanakan dan membangun prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik membutuhkan waktu yang cukup lama dan usaha yang dilakukan harus berjalan secara optimal. Selain itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme yang besar dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu sektor pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memelihara solidaritas untuk mencapai pemerintahan yang baik sehingga terwujudnya kinerja yang berkualitas.

Menurut Hardiwinoto dalam (Wulan Dary, 2020), menyatakan bahwa *Good Government Governance* merupakan sebuah konsep yang mengacu terhadap proses pencapaian suatu keputusan serta pelaksanaan yang akan dilakukan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan secara bersama – sama. *Good Government Governance* mendasarkan terhadap sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintahan, warga Negara, dan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara.

Menurut World Bank dan UNDP dalam buku (Moenek & Suwanda, 2019) menyatakan bahwa *good governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik atau sebagai wujud penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi dan pasar efisien,

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan usaha.

Tata pemerintahan yang baik, atau sering disebut dengan *good governance*, harus dilaksanakan untuk menghasilkan kinerja yang baik, bersih dan sesuai dengan fungsinya. Konsep *good governance* diawali dari ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik (Maryam, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya keberadaan tata pemerintahan yang baik dari suatu sistem negara sangat diperlukan untuk segala kegiatan di lembaga Negara.

Pencapaian *good government governance* di era globalisasi membutuhkan transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai kegiatan. Kunci utama diperlukannya tata kelola yang baik yaitu untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui mekanisme yang memantau kinerja operasi dan memperkuat akuntabilitas dengan upaya yang dilakukan untuk memperkuat dan mempertegas tanggung jawab para pemangku kepentingan lainnya dengan organisasi publik. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk menyediakan *public goods and services* disebut *governance*, sedangkan praktik terbaiknya atau lebih dikenal dengan pemerintahan yang baik disebut *Good Government Governance* (Bastian, 2016).

Oleh sebab itu pemerintah sebagai pelaku utama dari pelaksanaan *good governance* dituntut untuk dapat bertanggung jawab, transparan dan lebih akuntabel dalam melakukan suatu pertanggungjawaban. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Salah satu opsi strategis untuk menerapkan *good governance* adalah peran pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi penggerak utama dan dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance* itu sendiri. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat dan dunia usaha sama – sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja organisasi publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah terhadap publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja terhadap masyarakat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merupakan salah satu organisasi publik yang bertugas memberikan pelayanan publik yang baik dan layak terhadap masyarakat. Masalah-masalah yang terdapat di dalam pelayanan publik khususnya pada kinerja organisasi pun sering muncul. Untuk melihat kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Pengaruh globalisasi mengakibatkan banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah mengenai penerapan dari tata kelola pemerintah yang baik. Konsep *good governance* ini memiliki pengaruh dan peranan utama dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Oleh karena itu respon terhadap *good government governance* ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun harus sigap dalam menanggapi hal ini.

Asas akuntabilitas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah akuntabilitas. Adapun penyusunan laporan kinerja sendiri berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2014. Pada pasal 13 dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 tersebut menyebutkan antara lain bahwa SKPD bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar ataupun dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing – masing entitas akuntabilitas kinerja SKPD. Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun dan sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Perpres dan PermenPAN-RB di atas. Laporan kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor atas program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi serta sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen rencana strategis. Laporan kinerja berisikan keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian strategis Dinas Pendidikan, capaian strategis tersebut dapat dilihat dalam capaian indikator kinerja utama (IKU) serta analisis kinerja berdasar tujuan dan sasaran, selain itu mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana yang sudah ditetapkan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang pendidikan. Pengukuran Kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dibagi menjadi dua sasaran yaitu yang pertama adalah Meningkatnya Mutu Kelulusan dan yang kedua adalah Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan. Dengan indikator Nilai Rata – Rata UN SD, Nilai Rata – rata UN SMP, Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7 – 12 tahun, Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 – 15 tahun, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MTs, SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB, Angka Putus Sekolah SD-MI, Angka Putus Sekolah SMP-MTs, Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B, Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B, Guru yg memenuhi kualifikasi S1 / DIV.

Namun pada indikator kinerja Dinas Kabupaten Bogor pada tahun 2020 terjadi pandemi global *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) yang berdampak pada Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. Dalam ranah pendidikan dituang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dengan sistem penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada tiap sekolah menggunakan pembelajaran jarak jauh, kemudian Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terkait peniadaan Ujian Nasional

(UN), Ujian Kesetaraan, dan Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid-19. Kejadian ini berdampak pada realisasi Indikator Nilai Rata – rata UN yang tidak tercapai pada tahun 2020.

Selanjutnya dari 12 indikator Aksesibilitas Pendidikan terdapat terdapat (empat) indikator yang belum mencapai target pada tahun 2020 yaitu Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimana Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini, pada tahun 2020 ditargetkan 47,75%, dan terealisasi 42,62%, dengan capaian 89,26% yang berarti belum mencapai target hal ini disebabkan belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas dan juga data anak PAUD belum semuanya terjaring dalam Data Pokok Pendidikan PAUD dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD). Lalu untuk indikator kedua adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, pada tahun 2020 ditargetkan 83,8%, dan terealisasi hanya 71,31%, dengan capaian 85,10% yang berarti belum mencapai target dikarenakan Tingkat kesejahteraan sosial siswa yang masih rendah dan juga Akses ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di daerah terpencil belum mencukupi atau radius jarak yang cukup jauh.

Selanjutnya indikator ketiga Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 – 15 tahun. Pada tahun 2020 ditargetkan 892 orang, dan hanya terealisasi 736 orang, dengan capaian 82,51% yang berarti belum mencapai target dikarenakan kebutuhan ratio guru terhadap murid belum mencukupi. Indikator keempat yang belum tercapai yaitu Angka Putus Sekolah SD-MI. Pada tahun 2020 ditargetkan 0,091%, dan hanya terealisasi 0.297%, dengan capaian 30.64% yang berarti belum mencapai target dikarenakan faktor ekonomi yang meliputi ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya.

Dari indikator tersebut membuktikan bahwa masih banyak indikator yang belum tercapai dan masih belum optimal dalam melakukan kinerjanya terhadap publik, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang masih harus diperbaiki untuk meningkatkan mutu kualitas indikator kinerja tersebut. Tingginya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi, Dinas Pendidikan harus mampu menghasilkan kinerja yang baik untuk menciptakan *Good Government Governance*. Terdapat beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa pemahaman *good government governance* terhadap kinerja memberikan dampak yang positif pada kemajuan dan perubahan masyarakat.

World Bank menyatakan bahwa transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan – perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Penerapan *Good Government Governance* sangat penting guna meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi (Mardiasmo, 2018).

Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh (Hutapea & Widyaningsih, 2017) yang berjudul “Pengaruh *Good Government Governance* dan

Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita. Secara simultan juga pengujian hipotesis tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *good government governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Rasio Kemandirian dan berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita. Kesimpulannya bahwa *Good Government Governance* dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Panjaitan, 2015) menyatakan bahwa “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Dilihat dari Persepsi Pegawai” (Studi Kasus di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman). Bahwa hasil menunjukkan bahwa *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh signifikan serta dapat diterima dan dapat diuji terhadap kinerja organisasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.

(Setiadi et al., 2015) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dari prinsip-prinsip *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado dapat teruji dan dapat diterima secara empiris. Namun, pada kinerja organisasi melalui prestasi pegawai dalam kenyataannya belum dapat tercapai secara optimal, adanya perbedaan yaitu pada kelompok pelaku usaha yang menilai rendah sementara kelompok pegawai justru menilai tinggi pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi, 2017) yaitu penerapan *good governance* dalam pelayanan publik menunjukkan hasil bahwa penilaian masyarakat terhadap kecamatan sukolilo Surabaya dikategorikan cukup baik dalam mengurus E-KTP. Penelitian yang dilakukan oleh (Yudhasena & Putri, 2019) menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja Pemerintah pada Daerah Kabupaten Karangasem. Pengendalian Intern di Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dan Budaya Organisasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhazizal M, 2019) yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: *Good Governance* Sebagai Pemediasi”. Bahwa komitmen organisasi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan tidak di mediasi oleh *good governance*. Namun dari sisi kompetensi *SDM good governance* berpengaruh terhadap

kinerja pemerintah desa dan Kompetensi SDM dan kinerja pemerintah desa dimediasi oleh *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas yang tertuang dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh “**Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor**”. Dalam rangka menguji efektifitas penerapan dari *good government governance* terhadap kinerja organisasi untuk mewujudkan pemerintahan dengan pelayanan yang berkualitas.

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Belum tercapainya indikator kinerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sehingga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya terlaksana. Dalam kinerja organisasi, prinsip *good government governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sudah sepenuhnya tercapai namun masih terdapat hambatan program – program di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan pelaksanaan untuk melakukan akuntabilitas kinerja organisasi terhadap publik.

Terdapat indikator yang belum mencapai target yaitu sasaran yang pertama adalah Meningkatnya Mutu Kelulusan dimana peniadaan Ujian Nasional (UN), Ujian Kesetaraan, dan Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid-19. Sehingga kejadian ini berdampak pada realisasi Indikator Nilai Rata – rata UN yang tidak tercapai pada tahun 2020. Pada sasaran kedua Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan terdapat 4 indikator yang belum tercapai yaitu Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun dan Angka Putus Sekolah SD-MI.

Selanjutnya masih terdapat perbedaan hasil antara satu peneliti dengan sembilan peneliti lainnya. Dari 10 peneliti terdahulu terdapat 1 peneliti yang hasil penelitiannya bahwa *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *Good Government Governance* pada Organisasi Dinas Pendidikan?
2. Bagaimana kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor?
3. Apakah *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kinerja pada Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan *good government governance* pada kinerja organisasi Dinas Pendidikan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

“Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan”. Serta penelitian penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir (skripsi) studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki tujuan khusus yakni:

1. Untuk menjelaskan kondisi di lapangan yang ditemui mengenai prinsip *good government governance* di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
2. Untuk menjelaskan kinerja organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3. Untuk menganalisis pengaruh *good government governance* terhadap kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada penulis mengenai kondisi, sistem struktur lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Government Governance* dan sebagai sarana untuk pengembangan tata pemerintahan yang baik. Dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai seberapa besar pelaksanaan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor khususnya dalam pengembangan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Serta memberikan penelitian dalam menilai dan juga mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik yang sudah memadai.

1.4.2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pihak instansi agar lebih memperhatikan penerapan *Good Government Governance*, karena hal ini akan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Pendidikan.

1.4.3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan serta *feedback* mengenai pengaruh *good government governance* pada kinerja organisasi Dinas Pendidikan. Agar saat melaksanakan kegiatan atau program dimasa depan dapat berjalan secara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama bagi yang tertarik dengan *good government governance* pada kinerja organisasi Dinas Pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Good Government Governance*

Good government governance atau tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai perilaku yang berdasarkan pada nilai – nilai yang mengarahkan atau mengendalikan masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari termasuk dalam melakukan pelayanan yang baik terhadap publik. *Good governance* sebagai tata kelola yang baik dalam suatu organisasi ataupun publik yang dilandasi oleh etika profesi dalam menjalankan tanggung jawabnya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya seperangkat peraturan atau tata pemerintahan yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis dan pelayanan publik.

Good governance dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *good governance* dalam sektor pemerintahan atau biasa disebut dengan *good government governance* dan *good governance* dalam sektor privat biasanya disebut sebagai suatu pengendali *corporate*, yang artinya jika sektor pemerintahannya memiliki nilai-nilai yang baik maka sektor privat juga akan berjalan dengan baik, sehingga pelayanan publik yang dihasilkan dapat tercapai. Tata kelola perusahaan yang baik adalah pilar tata kelola perusahaan dengan lingkungan modal pemangku kepentingan dan sumber daya manusia (Candra, 2018). Menurut Sedarmayanti dalam buku (Moenek & Suwanda, 2019) *governance* sebagai terjemahan dari pemerintah kemudian dikembangkan dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance*.

Menurut jurnal (Firmansyah & Rahmawati, 2020) *Governance* diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan proses yang di mana keputusan tersebut dapat diimplementasikan, maka hasil dari analisis *governance* difokuskan pada faktor – faktor formal dan informal yang melibatkan pengambilan keputusan dan implementasinya dan juga struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*

Kristiadi sebagaimana yang dikutip oleh (Suaib, 2018) mengemukakan bahwa *good governance* menciptakan suatu keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran mekanisme pasar, sebab kebutuhan akan *good governance* dalam pelayanan dan administrasi publik adalah pentingnya dengan kebutuhan efisiensi mekanisme pasar.

Penyelenggaraan *good government governance* merupakan syarat utama untuk mewujudkan sebuah aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut Coryanata dalam buku (Moenek & Suwanda, 2019) tata kelola pemerintah yang baik *good government governance* merupakan isu aktual di semua negara di dunia ini. Pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. Perubahan sistem ekonomi yang dibawa oleh arus informasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap *good government governance*.

Menurut Sadjijono dalam jurnal (Firmansyah & Rahmawati, 2020) menyatakan *good governance* diartikan sebagai: “Kegiatan dari suatu lembaga pemerintah yang dijalankan didasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut LAN & BPKP mendefinisikan *good governance* adalah “Bagaimana pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat dan mampu mengelola sumber daya dalam pembangunan”.

Menurut World Bank dalam buku (Moenek & Suwanda, 2019) lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan pada masyarakat. Sedangkan menurut UNDP lebih menekankan terhadap aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Berdasarkan pengertian World Bank dan UNDP dapat diartikan bahwa *good governance* merupakan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi. Baik secara politik maupun administratif serta menjalankan disiplin anggaran maupun penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa *good government governance* merupakan tata kelola pemerintah yang baik yang mengatur pemerintahan dan memiliki hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, ekonomi dan politik yang dilakukan dengan mematuhi prinsip *good governance* dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1. Tujuan Good Government Governance

Tujuan dari penerapan *good government governance* yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan pemerintahan yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat yang mandiri. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka para aktor ataupun pilar-pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan dapat membangun kolaborasi, *networking* dan serta peran dari masyarakat terhadap penyelenggaraan negara bukan perkara yang mudah (Mardiasmo, 2018).

Dengan dibentuknya konteks *governance* maka peran yang diemban pemerintah semakin banyak yang bisa dijalankan. Peran yang dimiliki oleh pemerintah selain peran strategi pada masa yang akan datang menurut Eddi Wibowo dalam buku (Moenek & Suwanda, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan situasi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan manusia berkelanjutan. Melindungi warga negara yang berada dalam posisi lemah dan rentan.
2. Meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah.
3. Memberdayakan masyarakat dan melakukan demokratisasi sistem politik.
4. Desentralisasi sistem administrasi.
5. Meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin.
6. Memperkuat integritas sosial dan keragaman budaya.
7. Melindungi lingkungan.
8. Mempromosikan kesejahteraan.

2.1.2. Manfaat *Good Government Governance*

Manfaat dari *Good Government Governance* menurut (Sari & Winarno, 2015) yaitu:

1. Terciptanya sistem kelembagaan dan manajemen yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan bertanggung jawab.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengambilan kebijakan publik.
3. Penurunan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi.
4. Terjaminnya kepastian hukum dan konsistensi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

2.1.3. Prinsip-prinsip *Good Government Governance*

Kunci utama untuk memahami *good government governance* merupakan pemahaman atas prinsip-prinsip yang dikandungnya. Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut akan diperoleh untuk mengukur kinerja dari suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan dapat dimulai bila ketika bersinggungan dengan seluruh unsur prinsip-prinsip dari *good government governance*.

UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam (Mardiasmo, 2018) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* sebagai berikut:

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berserikat dan berpendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum baik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*, lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*, berorientasi terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Efficiency dan effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan efektif

7. *Equity*, setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.
8. *Accountability*, tanggung jawab kepada masyarakat atas segala kegiatan yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi di masa depan.

Dari sembilan prinsip tersebut, terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan *good governance* yaitu penciptaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas World Bank dalam (Mardiasmo, 2018).

2.1.3.1. Transparansi

Dalam jurnal (Saribu & Serdang, 2017) menyatakan bahwa istilah transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat dari *transparent*. Transparansi dalam konteks pemerintahan merupakan suatu keadaan semua keputusan dan proses pengambilan keputusan di bidang administrasi publik dapat dilihat oleh semua orang. UU No. 28 Tahun 2000 menyatakan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, asas keterbukaan atau sering disebut transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara. Transparansi atau keterbukaan bermakna tersedianya informasi yang akurat, cukup dan tetap waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya.

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada beberapa indikator dari transparansi, yaitu:

- a. Memberikan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung jawab
- b. Kemudahan dalam mengakses suatu informasi.
- c. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan atau permintaan uang suap.
- d. Bekerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah untuk meningkatkan arus informasi

2.1.3.2. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui badan perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi ini dilandasi oleh dasar kebebasan berasosiasi dan berekspresi serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2018).

Ada beberapa indikator pada partisipasi, yaitu:

- a. Memiliki forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, terarah, dan bersifat terbuka;
- b. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses melakukan pengambilan keputusan.

2.1.3.3. Akuntabilitas Publik

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam (Neni, Nurlela, Karlina, 2021) akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas Publik menurut (Mardiasmo, 2018) merupakan kewajiban seorang pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan juga mengungkapkan segala kegiatan – kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemegang amanah (*principal*) yang memiliki wewenang dan hak untuk dapat meminta pertanggungjawaban tersebut.

Ada beberapa indikator dari akuntabilitas, diantaranya:

- a. Proses pengambilan keputusan yang dibuat tertulis, dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai etika yang sesuai dengan prinsip administrasi yang baik;
- b. Kejelasan tujuan kebijakan yang konsisten sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku;
- c. Kelayakan dan konsistensi dari tujuan prioritas operasional.

Akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2018) terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) Pertanggung jawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- 2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan kepada kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan suatu pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* yang mengacu terhadap pengelolaan atas sebuah aktivitas secara efisien dan ekonomi tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah akuntabilitas. Asas akuntabilitas ini

adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Adapun penyusunan laporan kinerja sendiri berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2014. Pada pasal 13 dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 tersebut menyebutkan antara lain bahwa SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing – masing entitas akuntabilitas kinerja SKPD. Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun dan sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi informasi publik dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.2. Kinerja Organisasi Sektor Publik

2.2.1. Pengertian Kinerja

Pembahasan mengenai kinerja tentunya tidak terlepas dari banyaknya teori yang berkaitan dengan kinerja, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mencapai suatu sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam sebuah kerangka strategis (Bastian, 2016).

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja organisasi, yang terdapat dalam buku (Zaharuddin, Supriyadi, 2021) dikemukakan sebagai berikut: Menurut Jakson dan Morgan mengemukakan pendapat bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang ingin dicapai. Sementara Pamungkas juga masih dalam buku yang sama menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja.

Dengan demikian dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa kinerja merupakan konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tujuan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Prawirosentono memberi batasan *performance* atau kinerja bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggung.

Kinerja didefinisikan (Mahsun, 2015) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan, sasaran, nilai suatu organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi. Kinerja dapat diketahui apabila seorang individu atau sekelompok orang memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria keberhasilan tersebut tertuang dalam bentuk tujuan atau target yang ingin dicapai. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil atau keluaran dari kegiatan atau program yang akan atau sudah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang ada.

2.2.2. Kinerja Organisasi Sektor Publik

Secara etimologis, kinerja berasal dari kata dasar yaitu “kerja”. Kinerja organisasi merupakan respon terhadap keberhasilan atau kegagalan dari tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja merupakan sebuah tingkat pencapaian dari suatu hasil yang dapat dilihat dari sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja organisasi dalam buku (Zaharuddin, Supriyadi, 2021) yaitu:

Menurut Surjadi menyatakan bahwa:

“Kinerja organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Dwiyanto dalam (Irtanto, 2020) menyatakan bahwa kinerja organisasi publik dapat dilihat dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik maka kinerja organisasi publik itu baru dapat dikatakan berhasil apabila mampu dalam mewujudkan tujuan dan misinya.

Dalam membantu Bupati Bogor untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan tugas pembantuan, hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan. Adapun fungsi kinerja organisasi Dinas Pendidikan yaitu:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
Pelaksanaan administrasi dinas
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk menjalankan kinerja organisasi publik secara transparansi dan akuntabel.

Oleh sebab itu organisasi publik mengusulkan tiga konsep yang mampu dipergunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu: *responsiveness*, *responsibility* dan *accountability*. Bentuk organisasi yang baik dan luwes sehingga berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan – perubahan yang terjadi di dalam

organisasi yang bersangkutan, tidak adanya ketegangan, tekanan maupun konflik di antara bagian – bagian organisasi tersebut.

2.2.3. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi, karena sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi periode lalu, periode sekarang, dan strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut (Fitriyah et al., 2019). Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Menurut (Mardiasmo, 2018) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu, memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik yang dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik yang digunakan untuk memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja sektor organisasi bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan secara komprehensif. Berbeda dengan dengan sektor swasta, karena sifat *output* yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangibile output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena perlu dikembangkan ukuran kinerja non – finansial.

2.2.4. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut (Mardiasmo, 2018) secara umum tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*)
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non – finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut (Mardiasmo, 2018) manfaat dari pengukuran kinerja adalah:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.

3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakat.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengukuran keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

2.2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Pencapaian suatu tujuan dan sasaran organisasi tidak terlepas dari kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusianya. Menurut (Mangkunegara, 2017), faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Faktor Kemampuan (*Alibility*)
Faktor *alibility* atau kemampuan psikologis kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge dan skill*). Untuk membantu mencapai kinerja terbaik, pimpinan dan pegawai perlu memiliki pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan perlu dilatih dengan baik dalam posisi mereka serta menguasai operasi sehari-hari mereka, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.
2. Faktor Motivasi (*Motivation*)
Motivasi diartikan sebagai suatu sikap yang dimiliki pemimpin dan pegawai terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka menunjukkan nilai positif atau negatif terhadap situasi kerja mereka, dan semua itu bisa memperlihatkan seberapa tinggi rendahnya motivasi yang dimiliki pimpinan pegawai.

Berdasarkan faktor – faktor diatas, dapat diketahui bahwa faktor individu dan faktor lingkungan kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap karyawan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Jika tujuan organisasi tersebut tercapai, maka menunjukkan kinerja organisasi berkerja dengan baik.

2.2.6. Indikator Kinerja Organisasi

Menurut (Dwiyanto, 2021), menyatakan bahwa dalam mengukur kinerja organisasi publik harus berdasarkan pada dimensi berikut ini:

- a. Produktivitas
Konsep produktivitas mengukur tidak hanya tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai hubungan antara input dengan output.

- b. Kualitas layanan
Isu atau masalah mengenai kualitas pelayanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik.
- c. Responsivitas
Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun rencana agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu dimensi kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang tidak baik.
- d. Responsibilitas
Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- e. Akuntabilitas
Akuntabilitas seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para *stakeholders*.

Dari kelima indikator diatas peneliti memilih untuk menggunakan tiga indikator yaitu produktivitas, responsivitas dan responsibilitas. Ketiga indikator ini dipilih dengan alasan bahwa indikator – indikator tersebut telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan untuk menilai kinerja dari suatu organisasi publik baik dari dalam dan luar organisasi. Berdasarkan indikator kinerja menurut beberapa sumber di atas, peneliti menggunakan indikator kinerja organisasi publik yang sesuai dengan kondisi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

2.3. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.3.1. Penelitian Sebelumnya

Dari judul penelitian tentang Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian baik berupa tesis maupun jurnal – jurnal melalui internet. Penulis menjabarkan secara ringkas dalam table penelitian terdahulu dibawah ini yang menjadi acuan penulis yang sesuai dengan penelitian saat ini antara lain:

Table 2. 1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Metode Analisis	Hasil
1.	(Panjaitan, 2015) Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi dilihat dari Persepsi Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman).	Independen: <i>Good Governance</i> (X1), Pengendalian internal (X2). Dependen: Kinerja organisasi (Y)	- Transparansi - Kemandirian - Akuntabilitas - Pertanggung-jawaban - Kewajaran - Lingkungan pengendalian resiko - Penelitian prosedur - Pengendalian pemantauan - Informasi - Komunikasi - Masukan - Proses pelaksanaan Kinerja - Keluaran atau Hasil Kinerja	Metode Analisis Linier Berganda.	Hasil dari penelitian ini adalah <i>good governance</i> dan pengendalian internal mempengaruhi kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman

			- Manfaat atau Dampak		
2.	(Setiadi et al., 2015) Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> (Suatu Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.	Independen: <i>Good Governance</i> (XI) Dependen: Kinerja Organisasi (Y)	- Manfaat atau Dampak - Prinsip Partisipasi - Prinsip transparansi - Prinsip responsivitas - Prinsip supremasi hukum - Prinsip akuntabilitas - Jumlah kerja - Mutu kerja - Luasnya pengetahuan dan keterampilan teknis mengenai pekerjaan atau tugas – tugas pegawai - Tingkat keterandalan dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.	Teknik analisis korelasi <i>product moment</i> (korelasi sederhana)	Penerapan prinsip - prinsip <i>good governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado dapat diterima dan dapat teruji keberlakuannya secara empiris. Teori-teori yang mendasarinya telah terjustifikasi. Namun pada Kinerja organisasi melalui prestasi pegawai dalam kenyataannya masih belum tercapai secara optimal, kelompok pelaku usaha masih menilai rendah sementara kelompok pegawai menilai tinggi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

3.	(Cahyadi, 2017) Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronika Kartu Tanda Penduduk Berbasis <i>Good Governance</i> di Kecamatan Sukolilo Surabaya)	Independen: <i>Good Governance</i> (X) Dependen : Pelayanan Publik (Y)	- <i>Transparency</i> - <i>Accountability</i> - <i>Responsiveness</i> - <i>Effective and Efficiency</i> - <i>Tangible</i> - <i>Reliability</i> - <i>Responsiveness</i> - <i>Assurance Empathy</i>	Metode Analisis Kualitatif.	Penilaian masyarakat di kecamatan Sukolilo Surabaya dalam mengurus E-KTP terhadap tingkat penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pelayanan E-KTP di kecamatan Sukolilo Surabaya dikategorikan sudah cukup baik.
4.	(Prayoga, 2017) Pengaruh <i>Good Governance</i> , Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Pelalawan)	Independen: <i>Good Governance</i> (X1), Budaya Organisasi (X2), Gaya Kepemimpinan (X3), Komitmen Organisasi (X4), Pengendalian Intern (X5) Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	- Pengarahan, - Integrasi, - Dukungan manajemen, - Kontrol, - Sistem imbalan, - Pola Komunikasi. - Sifat, - Kebiasaan, - Temperamen, - Watak, Kepribadian. - <i>Affective commitment</i> , - <i>Continuance commitment</i> , - <i>Normative commitment</i> , - <i>commitment</i> , - <i>Continuance commitments Normative commitment</i>	Metode Analisis Deskriptif	<i>Governance</i> bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pada <i>Good Governance</i> , maka Kinerja Pemerintah Daerah akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila semakin rendah pada <i>Good Governance</i> , maka Kinerja Pemerintah Daerah akan semakin menurun. Pada variabel Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan,

					Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
5.	(Alamsyah, 2018) Pengaruh Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Organisasi (studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi)	Independen: <i>Good Governance</i> (X) Dependen : Kinerja Organisasi (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi - Penerapan Hukum - Transparansi - Responsivitas - Orientasi - Keadilan - Efektivitas - Akuntabilitas - Strategi Visi - Produktivitas - Responsibilitas - Kualitas Layanan 	Metode Analisis Regresi Linier Sederhana	Pelaksanaan <i>good governance</i> Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sudah tergolong baik, dilihat dari adanya penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Kinerja organisasi pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sudah tergolong baik, dilihat dari adanya prinsip - prinsip produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas. Pelaksanaan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja organisasi pada Kantor Dinas

					Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
6.	(Hutapea & Widyaningsih, 2017) Pengaruh <i>Good Government Governance</i> Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)	Independen: <i>Good Governance</i> (X1) Ukuran Legislatif (X2) Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	- Kemandirian - Akuntabilitas - Transparansi - Partisipasi - Keadilan - Efisiensi - Efektifitas - PDRB - Tingkat kemiskinan dan Rasio	Metode Analisis Statistik Deskriptif.	Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>good government governance</i> terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>good government governance</i> terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>good government governance</i> terhadap kinerja pemerintah daerah dengan

					<p>proksi Rasio Kemandirian. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan proksi PDRB Per Kapita.</p>
7.	<p>(Nurhazizal M, 2019)</p> <p>Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: <i>Good Governance</i> Sebagai Pemediasi</p>	<p>Independen: Komitmen Organisasi (X1), Budaya Organisasi (X2), Gaya Kepemimpinan (X3) Kompetensi Sdm (X4)</p> <p>Dependen: Kinerja Pemerintah Desa: <i>Good Governance</i> Sebagai Pemediasi (Y)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemauan, - Kesetiaan - Kebanggaan - Keadilan - Transparansi - Akuntabilitas 	<p>Metode Alternatif Dengan Partial Least Square</p>	<p>Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan <i>good governance</i> tidak memediasi komitmen organisasi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Kompetensi <i>SDM good governance</i> berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan <i>good governance</i> memediasi Kompetensi SDM dan kinerja pemerintah desa.</p>

8.	<p>(Yudhasena & Putri, 2019)</p> <p>Pengaruh <i>Good Government Governance</i>, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah</p>	<p>Independen: <i>Good Government Governance</i> (X1) Pengendalian Internal (X2) Budaya Organisasi (X3)</p> <p>Dependen: Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Y)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi - Akuntabilitas - <i>Responsibilitas</i> - Keadilan - Kemandirian - Komitmen organisasi - Kemauan - Kesetiaan - Kebanggaan 	<p>Metode Analisis regresi linier berganda</p>	<p><i>Good Government Governance</i> memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Pengendalian Intern di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Budaya Organisasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.</p>
9.	<p>(Nurfitriani, 2019)</p> <p>Pengaruh Pelaksanaan <i>Good Government Governance</i> Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus</p>	<p>Independen: <i>Good Government Governance</i> (X)</p> <p>Dependen : Kinerja Pegawai (Y)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi - Aturan hukum - Transparansi - Daya tanggap - Orientasi - Keadilan - Efektivitas & Efisiensi - Akuntabilitas 	<p>Analisis regresi linier sederhana</p>	<p>Pelaksanaan <i>good government governance</i> pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah diterapkan dengan cukup</p>

	Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung)		<ul style="list-style-type: none"> - Visi Strategi - Jumlah pekerjaan - Kualitas pekerjaan - Ketepatan waktu - Kehadiran - Kemampuan kerjasama 		<p>baik dilihat dari adanya pelaksanaan prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan strategi visi. Pada Kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah dilakukan dengan baik dilihat dari penerapan prinsip-prinsip jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama.</p>
10.	<p>(Claudya, 2020)</p> <p>Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang</p>	<p>Independen: <i>Good Governance</i> (X1) Pengendalian Internal (X2)</p> <p>Dependen : Kinerja Organisasi (Y)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi - Tegaknya - Supremasi Hukum - Daya tanggap - Berorientasi pada Konsensus - Kesetaraan - Efektifitas & Efisien - Akuntabilita - Lingkungan Pengendalian - Pengendalian Resiko 	<p>Metode Analisis Linier Berganda</p>	<p>Kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dipengaruhi oleh <i>good governance</i>, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan</p>

	Dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Mediasi		<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan Komunikasi - Pemantauan - Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum - Akuntabilitas Proses - Akuntabilitas Program 	<p>akuntabilitas publik. Berdasarkan jawaban dari responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut hampir semua menyetujui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah menerapkan <i>good governance</i>, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan akuntabilitas publik</p>
--	------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yang meliputi variabel independen, variabel dependen, unit analisis atau subyek yang diteliti data yang diteliti dan metode yang digunakan. Yang nantinya akan digunakan sebagai perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yaitu *Good Government Governance* pada penelitian (Panjaitan, 2015), (Setiadi et al., 2015), (Cahyadi, 2017), (Prayoga, 2017), (Hutapea & Widyaningsih, 2017), (Alamsyah, 2018), (Yudhasena & Putri, 2019), (Nurfitriani, 2019), (Claudya, 2020). Persamaan variabel dependen yaitu Kinerja Organisasi terdapat pada penelitian (Panjaitan, 2015), (Setiadi et al., 2015), (Alamsyah, 2018), (Claudya, 2020). Persamaan unit analisis terdapat pada penelitian (Nurfitriani, 2019). Pada penelitian ini memiliki persamaan metode penelitian dengan (Alamsyah, 2018) dan (Nurfitriani, 2019) dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana.

Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada variabel penelitian yang digunakan oleh (Nurhazizal M, 2019) variabel independen yang digunakan yaitu Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kompetensi SDM. Sedangkan pada penelitian ini memiliki variabel independen *Good Government Governance* tidak

memakai Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kompetensi SDM.

Perbedaan pada unit analisis terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan, 2015) unit analisis yang digunakan yaitu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman. Unit analisis penelitian yang dilakukan (Setiadi et al., 2015) memiliki perbedaan yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Unit analisis penelitian (Cahyadi, 2017) pada Kecamatan Sukolilo Surabaya sedangkan pada penelitian ini memiliki unit analisis Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga, 2017) memiliki perbedaan unit analisis yaitu pada SKPD Kabupaten Pelalawan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hutapea & Widyaningsih, 2017) 33 Provinsi di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yudhasena & Putri, 2019) unit analisis yang digunakan yaitu Organisasi Perangkat Daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Claudya, 2020) unit analisis yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Sedangkan pada penelitian ini memiliki unit analisis Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada metode penelitian yaitu pada penelitian (Panjaitan, 2015) menggunakan metode penelitian analisis regresi berganda. Pada penelitian (Setiadi et al., 2015) menggunakan metode penelitian analisis korelasi *product moment*. Pada penelitian (Cahyadi, 2017) menggunakan metode penelitian analisis kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi sederhana.

Pada penelitian (Hutapea & Widyaningsih, 2017) menggunakan metode penelitian analisis statistik deskriptif. Pada penelitian (Nurhazizal M, 2019) melakukan metode penelitian *partial least square*. Pada penelitian (Yudhasena & Putri, 2019) menggunakan metode penelitian analisis regresi berganda. Pada penelitian (Claudya, 2020) menggunakan metode penelitian analisis linier berganda sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi sederhana.

2.3.2. Kerangka Pemikiran

Untuk menciptakan *Good Government Governance* perlu dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berhasil dan berguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Undang – Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Good Government Governance* adalah sebuah konsep penerapan yang digunakan untuk upaya memperbaiki kinerja suatu organisasi dalam menghadapi situasi global.

Kinerja organisasi sektor publik merupakan sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi serta strategi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan atau kegiatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Tercapainya kinerja organisasi kerja bukan saja ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti pengelolaan kinerja organisasi, pengendalian yang baik yang disebut dengan *Good Government Governance* (Setiawan, 2016).

Sesuai uraian diatas maka disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi publik, struktur organisasi dan sumber daya manusianya baik maka akan tercipta *Good Government Governance* yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan *Good Government Governance* akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sehingga para *stakeholders* dalam hal ini masyarakat luas dapan merasa terpuaskan akan hasil kinerja dari organisasi tersebut.

2.3.2.1. *Good government governance* berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Menurut World Bank dalam (Mardiasmo, 2018) terdapat tiga prinsip yang mendukung tata kelola yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh seseorang yang membutuhkan. Partisipasi diartikan supaya masyarakat dapat memberikan aspirasi, yang nantinya dapat dijadikan dasar oleh pemerintah dalam mengambil keputusan. Akuntabilitas diartikan untuk menjelaskan sebuah peran dan tanggungjawab, serta mendukung upaya pemerintah untuk menjamin penyeimbangan kepentingan masyarakat. Untuk melihat ketiga prinsip tersebut sudah diterapkan atau belum, maka diperlukannya pengukuran kinerja organisasi yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari suatu organisasi publik.

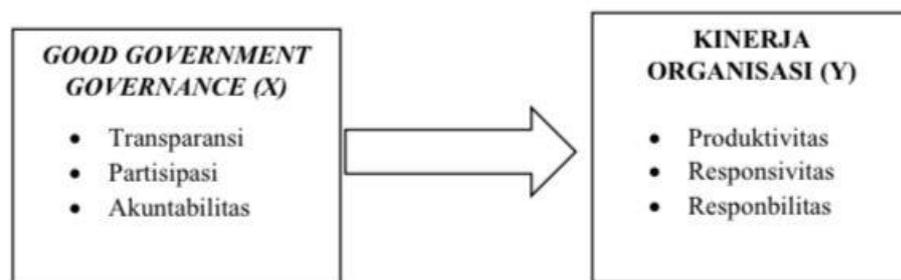
Menurut (Dwiyanto, 2021) terdapat beberapa indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi, yaitu: Produktivitas, Responsivitas dan Responsibilitas. *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena *Good Government Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen dengan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal dan political framework* bagi tumbuhnya aktivitas bisnis dan usaha (Mardiasmo, 2018).

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, (Yudhasena & Putri, 2019), (Alamsyah, 2018), (Prayoga, 2017), (Nurfitriani, 2019), (Cahyadi, 2017), (Setiadi et al., 2015), (Panjaitan, 2015). Variabel penelitian diatas mengenai pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kinerja Organisasi,

menunjukkan bahwa *Good Government Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Organisasi. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penyusunan merumuskan hipotesis sebagai berikut: Berdasarkan jawaban dari responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner pada penelitian (Claudya, 2020) hampir semua menyetujui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah menerapkan *good governance*, Sistem Produktivitas Pengendalian Intern Pemerintah dan akuntabilitas publik.

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.2.2. Gambar Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Menurut gambar kerangka pemikiran di atas, maka dapat dihubungkan antara *Good Government Governance* diterapkan sesuai dengan prinsip – prinsip yang berlaku apakah akan berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diteliti dan diuji kebenarannya. Kebenaran dari hipotesis tersebut harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2018). Sebelum mendapatkan fakta – fakta yang benar, sebelumnya mereka akan membuat dugaan sementara, masalah atau peristiwa yang menjadi titik permasalahan tersebut. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian tersebut rumusan hipotesis penelitian yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- H₁ : *Good Government Governance* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dengan baik.
- H₂ : Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor cukup baik.
- H₃ : *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Verifikatif dengan metode “*Eksplanatory Survey*”. (Nuryaman & Christina, 2015) mendefinisikan penelitian eksplanatori sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh sebuah jawaban tentang “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena tersebut dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan serta menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel penelitian”.

Metode *eksplanatory* menurut (Edison, 2018) adalah penelitian yang berhubungan dengan suatu penemuan. Penelitian *eksplanatory* dilakukan berdasarkan pada keadaan dimana peneliti belum mengetahui situasi dan kondisi yang akan diteliti serta belum adanya informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan suatu masalah dan bagaimana permasalahan yang sama telah dipecahkan pada masa lalu oleh peneliti terdahulu.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran untuk mendapatkan suatu data untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Sesuai dengan pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh yang menyebutkan bahwa subjek penelitian dalam metode penelitian adalah unit analisis atau unit observasi yang akan diteliti. Dengan mengacu pada definisi diatas, maka yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *Good Government Governance* sebagai variabel independen (X) dan Kinerja Organisasi sebagai variabel dependen (Y).

3.2.2. Unit Analisis

Unit analisis merupakan satuan penelitian yang akan dianalisis. Pada penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah organisasi karena penelitian ini berhubungan dengan kinerja organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variabel – variabel yang akan dianalisis untuk dapat memperoleh data dan informasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Jl. Nyaman No.1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914. Sehingga peneliti dapat memperoleh data – data dan informasi yang tepat dan sesuai dengan kenyataan dari pihak terkait.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif data yang diperoleh dengan mengukur nilai variabel dalam sampel dan populasi yang ada berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

1) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi atau berupa sebuah uraian atau penjelasan mengenai variabel yang akan diteliti.

2) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian yang bersifat statistik. Penelitian ini dapat diukur, dihitung serta dapat dideskripsikan dengan angka.

3.3.2. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau unit analisis yang akan diteliti berupa jawaban terhadap kuesioner yang akan dibagikan kepada pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sesuai dengan target atau sasaran dari penelitian yang akan dilakukan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan berbagai literatur, seperti buku, karya ilmiah, majalah dan pendapat para ahli yang berkompetensi serta penyedia data dari website Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan penetapan aturan agar dapat melakukan suatu penelitian melalui penentuan indikator – indikator atau ukuran – ukuran dari sebuah konsep yang abstrak dan kemudian indikator tersebut digunakan dalam mengukur fakta, realitas yang dapat diobservasi secara empiris (Nuryaman & Christina, 2015). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2018) variabel penelitian dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Variabel Independen (X)

Menurut (Sugiyono, 2018) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel dependen (terikat). Penelitian ini terdapat satu variabel independen yaitu *Good Government Governance* (X).

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut (Sugiyono, 2018) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi suatu akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Organisasi.

Table 3. 1

Operasionalisasi Variabel Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	
<p>Independen : <i>Good Government Governance</i> (X) merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. Peghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi. Baik secara politik maupun administratif serta menjalankan disiplin anggaran maupun penciptaan <i>legal and political framework</i> bagi tumbuhnya aktivitas usaha. World Bank dalam (Mardiasmo, 2018)</p>	<p>Transparansi <i>(Transparency)</i></p>	a. Penyediaan informasi yang akurat tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, keuangan dan tanggung jawab	Ordinal	
		b. Kemudahan untuk mengakses suatu informasi bagi yang membutuhkan		
		c. Menyusun mekanisme pengaduan apabila adanya peraturan yang dilanggar atau permintaan uang suap.		
		d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.		
	<p>Akuntabilitas <i>(Accountability)</i></p>	a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis dan tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik.	Ordinal	
		b. Menyampaikan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Contoh: LAKIP		
	<p>Partisipasi <i>(Participation)</i> Menurut World Bank dalam (Mardiasmo, 2018)</p>	a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang bersifat terbuka terhadap pemerintah	Ordinal	
		b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan		
	<p>Dependen: Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan, sasaran, nilai suatu organisasi yang tertuang dalam <i>strategic planning</i> organisasi (Mahsun, 2015)</p>	<p>Produktivitas</p>	a. Mengukur tingkat efisiensi.	Ordinal
			b. Mengukur tingkat pelayanan organisasi publik	
<p>Responsivitas</p>		a. Menyusun agenda dan prioritas layanan	Ordinal	
		b. Mengenali kebutuhan masyarakat		
		c. Mengembangkan program sesuai kebutuhan masyarakat		
<p>Responsibilitas (Dwiyanto, 2021)</p>		a. Pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan dengan menerapkan prinsip administrasi yang baik	Ordinal	
	b. Kegiatan organisasi dilakukan dengan kebijakan organisasi			

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kausalitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Menurut populasi menunjukkan seluruh orang, kejadian, atau sesuatu yang menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi. Berdasarkan pengertian populasi tersebut dan apabila dikaitkan dengan judul yang diambil penulis yaitu Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Organisasi, maka yang menjadi populasi atau unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, yang membentuk sampel hanyalah beberapa elemen populasi saja, bukan seluruh elemen (Nuryaman & Christina, 2015).

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Menurut (Nuryaman & Christina, 2015) mendefinisikan *purposive sampling* yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki kriteria tertentu. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada 52 pegawai Dinas Pendidikan dari 107 populasi yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil di tiap bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang meliputi kepala dinas, sekretaris dinas yang membawahi 3 sub bagian, kepala bidang dan kepala seksi yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
2. Minimal pegawai yang masa kerja 1 tahun.
3. Tingkat pendidikan minimal SMA.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sebuah media perantara). Data primer khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (interview), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dokumentasi dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2018).

Survey

Survey merupakan pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan secara tertulis (angket) yang diajukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari kuesioner adalah dijadikan skala ordinal variabel X dan variabel Y. Menurut (Sugiyono, 2018) skala ordinal adalah:

“Skala yang didasarkan pada kategorisasi variabel yang diukur dengan memeringkat variabel tersebut, dengan diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai terendah atau sebaliknya, tetapi jarak-jarak antar kategori tidak ada”.

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran untuk variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian adalah skala *likert*. Tipe skala *likert* digunakan agar responden dapat menyatakan sikapnya seberapa kuat ia setuju atau tidak setuju atas suatu pernyataan tertentu (Nuryaman & Christina, 2015).

Skala likert menurut (Sugiyono, 2018) yaitu :

1. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
2. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

Untuk mendukung hal tersebut, penulis menggunakan 5 (lima) jenjang kriteria. Berikut disajikan mengenai *scoring* untuk jawaban kuesioner :

Table 3. 2

Skala Likert

No	Item Instrumen	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Instrumen penelitian yang digunakan skala likert dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun pilihan ganda. Dalam isi kuesioner terdapat uji validitas dan uji reliabilitas.

b. Metode Observasi

Pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap fenomena – fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Observasi bisa dilakukan dengan melihat pelayanan pegawai, tata cara bahasa pegawai, perilaku pegawai dan pengamatan objek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

3.6.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan berbagai literatur, seperti buku, karya ilmiah, majalah dan pendapat para ahli yang berkompetensi, penelitian terdahulu serta penyedia data dari website Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

3.7. Uji Kualitas Data

Penelitian yang mengukur variabel menggunakan instrumen kuesioner secara tidak langsung melalui media perantara yang ada. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa *valid* atau *reliable* kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas dari hasil penelitian (Ghozali, 2018).

3.7.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah satu aktivitas dalam menunjukkan keabsahan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Menurut (Sugiyono, 2018) hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Untuk menguji validitas alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan Rumus Koefisien *Korelasi Product Moment Pearson* sebagai berikut:

$$r = \frac{n (\sum xy) - (\sum X) (\sum Y)}{n (\sum x)^2 - (\sum x)^2 (n (\sum y^2) - (\sum y)^2)}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

Y = Skor butir

X = Skor total butir

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel dengan menggunakan SPSS 26.0. Setelah dinyatakan valid maka skor – skor tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya

Berikut adalah kriteria penilaian uji validitas :

- Apabila r terhitung > r tabel ,maka kuesioner valid
- Apabila r terhitung < r tabel ,maka kuesioner tidak valid

3.7.2. Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono, 2018) hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau

instrumen dalam penelitian ini digunakan koefisien *Alpha Cronbach* Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian.

Koefisien *Alpha Cronbach* ditunjukkan dengan :

$$\alpha = \frac{k - \bar{r}}{1 + (k-1) \cdot \bar{r}}$$

Keterangan :

k : Jumlah variabel manifest yang membentuk variabel laten

r : Rata – rata korelasi antar variabel manifest.

Menurut (Temalagi, 2015) suatu kontruk atau variabel dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach Alpha > 0.70, namun jika nilai 0.60 – 0.70 masih dapat diterima.

Table 3. 3
Tingkat Reliabilitas

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 - 0,20	Kurang Reliabel
0,201 – 0,40	Agak Reliabel
0,401 – 0,60	Cukup Reliabel
0,601 – 0,80	Reliabel
0,801 – 1,00	Sangat Reliabel

3.8. Metode Pengolahan Data/Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Hasil dari analisis data tersebut dapat memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Untuk itu, pada penelitian ini digunakan metode analisis data yang dapat memberikan kesimpulan mengenai pengaruh dan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut merupakan analisis data yang digunakan.

3.8.1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel – variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range (Ghozali, 2018). Metode analisis data dilakukan dengan bantuan suatu program pengolah data SPSS 26.0.

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik merupakan syarat

yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut:

3.8.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan grafik Normal P-P of regression standardized residual untuk menguji normalitas data dan pendekatan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Untuk pendekatan grafik jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2018)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendeteksi normal. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu:

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka populasi tidak berdistribusi secara normal

3.8.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara variabel dependen (terikat) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2018).

Dasar analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi pada dasarnya untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, selain itu juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018). Analisis regresi linear sederhana merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat adanya suatu hubungan dan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak

statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Adapun persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b X + c$$

Keterangan:

Y = *Good Government Governance*

X = Kinerja Organisasi

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = *error term*

3.9. Pengujian Hipotesis

Suatu pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui kebenarannya, apakah hipotesis yang diperoleh hanyalah suatu anggapan atau dugaan sementara yang kebenarannya belum pasti, sehingga diperlukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu sendiri adalah suatu prosedur yang memungkinkan kita mengambil keputusan, apakah keputusan itu diterima atau ditolak. Hipotesis yang digunakan oleh penulis diuji dengan menggunakan koefisien determinasi, analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis (Uji t).

Rancangan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS serta meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan hipotesis nol
2. Pemilihan tes statistik dan perhitungan
3. Penetapan tingkat signifikan

Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y.

3.9.1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Uji statistik t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Langkah-langkah pengujian dalam menggunakan Uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas $< 0,05$ maka variabel X secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y
2. Jika probabilitas $> 0,05$ maka variabel X secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Dengan kriteria pengujian:

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai t hitung $> t$ tabel / $-t$ hitung $< -t$ tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen
- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai t hitung $< t$ tabel / $-t$ hitung $> -t$ tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

3.9.2. R-Squared (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Klasifikasi koefisien korelasi yaitu, 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi moderat), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1,00 (korelasi sempurna). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel – variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Rumus Koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Dimana KD merupakan besarnya koefisien penentu (determinan) dan R^2 merupakan koefisien korelasi

3.9.3. Penetapan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi (*significant level*) adalah besarnya peluang kita menolak hipotesis nol yang seharusnya kita terima. Atau besarnya resiko kesalahan yang akan kita tanggung dalam pengambilan kesimpulan. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 atau 5%, karena dianggap cukup untuk mewakili dan menilai hubungan antara variabel yang diuji dan merupakan tingkat signifikansi yang paling umum digunakan dalam penelitian.

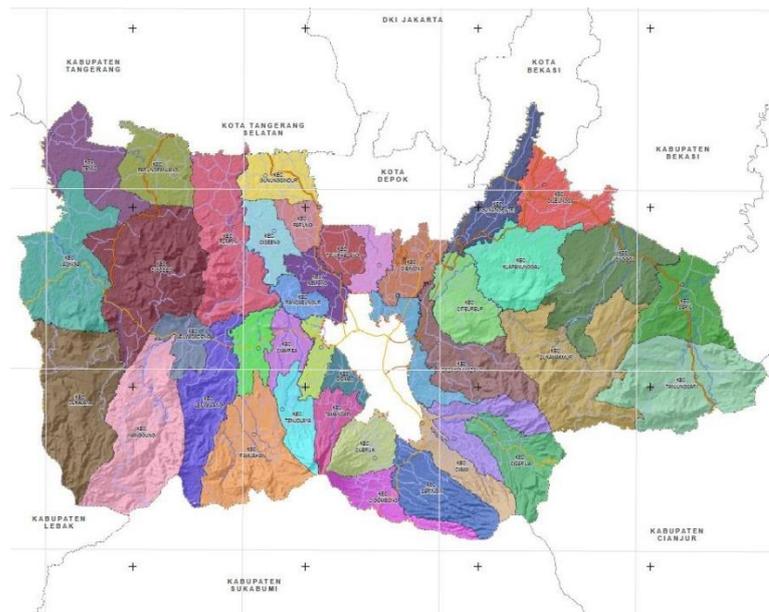
BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Data yang diperoleh mengenai gambaran umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor :

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor



Sumber : <https://bogorkab.go.id/pages/letak-geografis>

Gambar 4. 1

Letak Geografis Kabupaten Bogor

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah sebesar $\pm 2.664 \text{ km}^2$, sekitar 5,19% dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Bogor terletak di antara $6,18^\circ \text{ LU} - 6,47^\circ \text{ LS}$ dan $106^\circ 23'45'' - 107^\circ 13'30''$ Bujur Timur. Kabupaten Bogor memiliki batas strategis antara lain:

- a. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi
- b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak
- c. Sebelah Barat Daya, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
- d. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kota Depok
- e. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
- f. Sebelah Timur Laut, berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
- g. Sebelah Tenggara, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur
- h. Sebelah Tengah, Kota Bogor

Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini *relative* rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol.

Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor. Secara klimatologi, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian Selatan dan iklim tropis basah di bagian Utara, dengan rata-rata curah tahunan 2.500 – 5.00 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun.

Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20° - 30°C, dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25°. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan. Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 7 (tujuh) buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) Sub DAS Kali Bekasi; (6) Sub DAS Cipamingkis; dan (7) DAS Cibeet. Selain itu juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintah, 794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ dan 96 mata air.

4.1.2 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

A. Visi

Terselenggara layanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Bogor yang cerdas, hingga berkarakter

B. Misi

1. Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau di semua wilayah.
2. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan serta pengelolaan Pendidikan Daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi

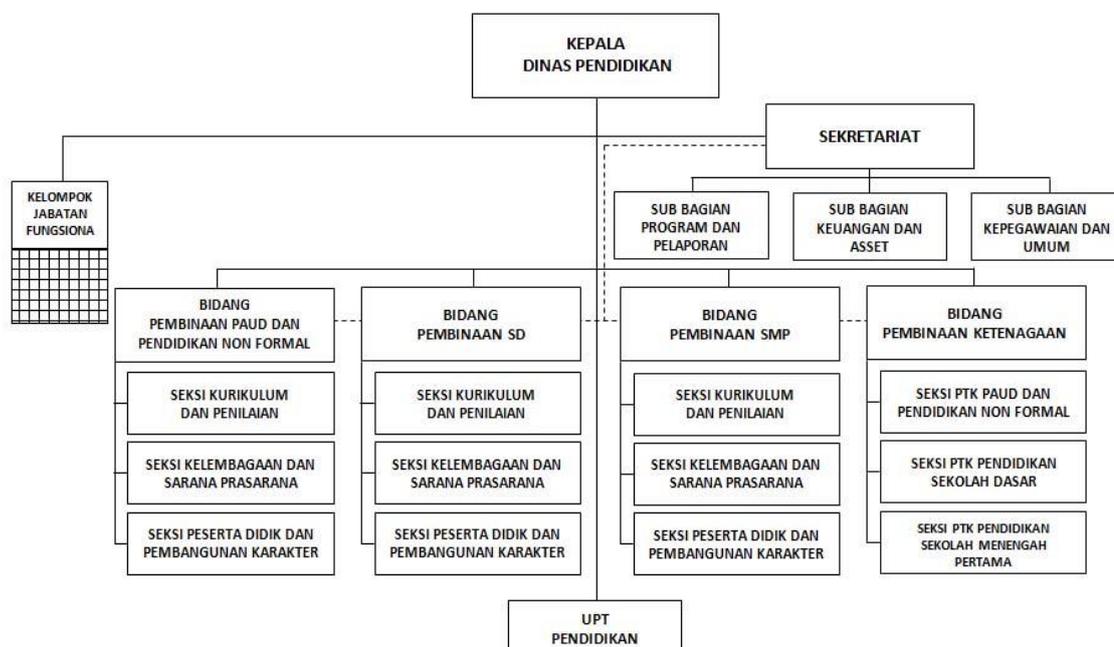
Dinas Pendidikan merupakan salah satu SKPD yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang, 3 (tiga) orang kepala subbag, 12 (dua belas) orang kepala seksi.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4. 2

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan kepada pegawai atau karyawan yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner yang dilaksanakan pada 07 Februari 2022 – 18 Februari 2022. Kuesioner yang disebar sebanyak 52 kuesioner dan yang kembali 52 dan yang kembali sebanyak 52 kuesioner atau sama dengan persentase 100%.

Table 4. 1

Data Penelitian

No	Keterangan	Pegawai	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	52	100%
2	Jumlah kuesioner yang kembali	52	100%
3	Jumlah yang dapat diolah	52	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

4.2.1 Karakteristik Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Berikut adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Setelah melihat hasil penyebaran kuesioner sebanyak 52 responden, maka dapat diketahui gambaran umum responden sebagai berikut:

4.2.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Kelamin.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 52 orang responden, maka diperoleh hasil persentase yang dijelaskan dalam identitas responden berdasarkan data jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

Table 4. 2
Jenis Kelamin Responden

Kode	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	25	48%
2	Perempuan	27	52%
Total		52	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor adalah laki – laki dengan jumlah responden sebanyak 25 responden atau dengan persentase 48%. Sedangkan jumlah responden perempuan yaitu sebanyak 27 responden atau dengan persentase sebesar 52%.

4.2.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur.

Table 4. 3
Umur Responden

Kode	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi
1	< 20 Tahun	0	0
2	20-29 Tahun	7	13%
3	30-39 Tahun	18	35%
4	40-49 Tahun	14	27%
5	> 50 Tahun	13	25%
Total		52	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil Tabel 4.3 dapat disimpulkan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mayoritas adalah berumur 30-39 tahun dengan jumlah responden sebanyak 18 responden atau dengan persentase sebesar 35%, selanjutnya responden yang berusia < 20 tahun dengan jumlah 0 responden atau dengan persentase sebesar 0%, responden yang berumur 20 – 29 tahun yaitu sebanyak 7 responden atau dengan persentase sebesar 13%, responden yang berumur 40 – 49 tahun sebanyak 14 atau dengan persentase 27% dan untuk responden yang berusia > 50 tahun sebanyak 13 responden atau dengan persentase 25%.

4.2.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.

Table 4. 4
Pendidikan Responden

Kode	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentasi
1	SMA	3	6%
2	Diploma	3	6%
3	S1	36	69%
4	S2	10	19%
5	S3	0	0%
Total		52	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 3 orang atau sebesar 6%, responden dengan pendidikan terakhir Diploma sebanyak 3 orang atau sebesar 6%, responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 36 orang atau sebesar 69 %, dan responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 10 atau sebesar 19% dan S3 sebanyak 0 responden atau 0% pada bagian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan terbanyak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor adalah S1 menyatakan pendidikan di dalam organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan, semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan sumber daya manusianya semakin tinggi..

4.2.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Table 4. 5
Lama Bekerja

Kode	Lama Bekerja	Frekuensi	Persentasi
1	< 1 Tahun	0	0%
2	1 - 3 Tahun	6	12%
3	> 3 Tahun	46	88%
Total		52	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil Tabel 4.5 di atas bahwa dapat diketahui terdapat responden dengan lama bekerja < 1 Tahun sebanyak 0 responden atau 0% , responden dengan lama bekerja 1 – 3 tahun sebanyak 6 responden atau 12% dan responden lama bekerja > 3 tahun sebanyak 46 responden atau 88%. Dapat disimpulkan bahwa pegawai yang terlibat dalam *Good Government Governance* pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bogor memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam melakukan *good government governance* dengan lebih efektif dan teliti.

4.2.2 Hasil Uji Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif dilakukan untuk menganalisis data-data statistik atas hasil uji yang dilakukan guna memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range (Ghozali, 2018). Metode analisis data dilakukan dengan bantuan suatu program pengolah data SPSS 26.0. Berikut adalah hasil analisis deskriptif dari variabel *Good Government Governance* terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan 21 butir pernyataan.

Table 4. 6

Hasil Uji Analisis Deskriptif

		Statistics	
		TOTAL_X	TOTAL_Y
N	Valid	52	52
	Missing	0	0
Mean		51.88	40.25
Median		51.50	40.00
Mode		48	36
Std. Deviation		4.592	3.429
Variance		21.084	11.760
Range		16	12
Minimum		44	33
Maximum		60	45
Sum		2698	2093

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel 4.6 diatas, dapat diberikan gambaran atau deskripsi dari data yaitu:

1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebanyak 52 orang
2. Variabel dependen penelitian yaitu Kinerja Organisasi (Y) memiliki nilai minimum 33 dan nilai maksimum 45, dengan nilai rata – rata dari Kinerja Organisasi yaitu sebesar 40,25 dengan median 40,00 , Mode 36 dengan standar deviation 3.429 dan *variance* sebesar 11.760.
3. Variabel dependen penelitian yaitu *Good Government Governance* (X) memiliki nilai minimum 60 dan nilai maksimum 44, dengan nilai rata – rata sebesar 51,88 dari *Good Government Governance*, nilai median sebesar 51,50, Mode 48 dengan standar deviation 4.592 dan *variance* sebesar 21.084.

4.2.3 Distribusi Jawaban Responden

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai acuan dalam memberi bobot di tiap pertanyaan, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, variabel dapat diukur dan dijabarkan menjadi dimensi kemudian dimensi dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Instrumen pertanyaan atau pernyataan akan menghasilkan total skor bagi setiap anggota sampel yang diwakili oleh setiap nilai skor seperti instrumen berikut:

Table 4. 7

Instrumen Skala Likert

Mutu	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: (Sugiyono, 2018)

Berdasarkan jumlah responden sebanyak 52 orang, maka dapat ditemukan bobot penilaian dengan menggunakan jarak yang dapat dihitung melalui nilai tertinggi dan nilai terendah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a) Nilai Tertinggi} &= \text{Total Responden} \times \text{Bobot Tertinggi} \\ &= 52 \times 5 \\ &= 260 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Nilai Terendah} &= \text{Total Responden} \times \text{Bobot Terendah} \\ &= 52 \times 1 \\ &= 52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) Jarak} &= \text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah} \\ &= 260 - 52 \\ &= 208 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) Interval} &= \frac{\text{Jarak}}{\text{Banyak Kelas}} \\ &= \frac{208}{5} \\ &= 41,6 \end{aligned}$$

Table 4. 8
Mutu Kelas Interval

No	Mutu	Interval	Kriteria
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	52 – 93,6	Sangat Buruk
2	Tidak Setuju (TS)	93,6 – 135,2	Buruk
3	Netral (N)	135,2 – 176,8	Sedang
4	Setuju (S)	176,8 – 218,4	Baik
5	Sangat Setuju (SS)	218,4 - 260	Sangat Baik

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

1. Distribusi Jawaban Responden Variabel *Good Government Governance* (X)

Table 4. 9
***Good Government Governance* (X)**

No	Pernyataan Variabel <i>Good Government Governance</i> (X)	Pilihan					Total	
		SS	S	N	TS	STS		
		5	4	3	2	1		
Indikator : Transparansi								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mempublikasikan profile, kegiatan, sarana dan prasarana serta jasa / pelayanan secara akurat.	Frekuensi	24	27	1	0	0	52
		Nilai	120	108	3	0	0	231
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan mengakses informasi.	Frekuensi	22	29	1	0	0	52
		Nilai	110	116	3	0	0	229
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyediakan sarana untuk masyarakat mengajukan saran atau keluhan.	Frekuensi	15	35	2	0	0	52
		Nilai	75	140	6	0	0	221
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memberikan informasi	Frekuensi	17	32	3	0	0	52

	yang dapat diakses pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal.	Nilai	85	128	9	0	0	222
Indikator : Partisipasi								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyediakan forum untuk menampung partisipasi masyarakat melalui media massa atau diskusi publik.	Frekuensi	12	35	4	1	0	52
		Nilai	60	140	12	2	0	214
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat kebijakan selalu melibatkan masyarakat.	Frekuensi	13	28	10	1	0	52
		Nilai	65	112	30	2	0	209
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuka diri bagi masyarakat untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan masukan.	Frekuensi	12	33	6	1	0	52
		Nilai	60	132	18	2	0	212
Indikator : Akuntabilitas								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat keputusan secara tertulis, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.	Frekuensi	26	25	1	0	0	52
		Nilai	130	100	3	0	0	233
2	Pegawai melaksanakan tugas berupa laporan keuangan dan program yang dilakukan secara berkala.	Frekuensi	19	33	0	0	0	52
		Nilai	95	132	0	0	0	227
3	Pegawai melaksanakan pertanggungjawaban berupa laporan tahunan keuangan dan program yang dilakukan secara berkala.	Frekuensi	25	25	2	0	0	52
		Nilai	125	100	6	0	0	231
4	Pegawai melaksanakan kinerja sesuai jumlah perencanaan, pelaksanaan program dan hasil.	Frekuensi	26	25	1	0	0	52
		Nilai	130	100	3	0	0	233
5	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan	Frekuensi	28	24	0	0	0	52

hasil dari suatu program organisasi yang telah dilakukan.	Nilai	140	96	0	0	0	236
-----------------------------------------------------------	--------------	-----	----	---	---	---	-----

- a. Pada dimensi Transparansi terdapat nilai dari Pernyataan X1.1 dengan total nilai 231, Pernyataan X1.2 dengan total nilai 229, Pernyataan X1.3 dengan total nilai 221, dan X1.4 dengan total nilai 222 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selalu mempublikasikan profil, kegiatan-kegiatan, sarana dan prasarana secara akurat dengan total nilai X lebih besar dari > 218,4 sehingga dapat dinyatakan bahwa *Good Government Governance* dapat dikatakan sangat baik dan menerapkan prinsip Transparansi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- b. Pada dimensi Partisipasi terdapat nilai dari Pernyataan X1.5 dengan total nilai 214, Pernyataan X1.6 dengan total nilai 209 dan Pernyataan X1.7 dengan total nilai 212 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selalu menerima masukan-masukan dari masyarakat dengan total nilai X lebih besar dari > 176,8 sehingga dapat dinyatakan bahwa *Good Government Governance* dapat dikatakan baik dan menerapkan prinsip Partisipasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- c. Pada dimensi Akuntabilitas terdapat nilai dari Pernyataan X1.8 dengan total nilai 233, Pernyataan X1.9 dengan total nilai 227, Pernyataan X1.10 dengan total nilai Pernyataan 231 X1.11 dengan total nilai 233 dan Pernyataan X1.12 dengan total nilai 236 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa pernyataan Keputusan yang diambil selalu memenuhi standar etika dan nilai – nilai yang berlaku dengan rata-rata tanggapan responden sebesar dengan total nilai X lebih besar dari > 218,4 sehingga dapat dinyatakan bahwa *Good Government Governance* dapat dikatakan sangat baik dan menerapkan prinsip Akuntabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

2. Distribusi Jawaban Responden Variabel Kinerja Organisasi (Y)

Table 4. 10

Kinerja Organisasi (Y)

No	Pernyataan Kinerja Organisasi (Y)	Pilihan	Pilihan					Total
			SS	S	N	TS	STS	
			5	4	3	2	1	
Indikator : Produktivitas								
1	Pegawai melaksanakan kinerja berdasarkan	Frekuensi	27	24	1	0	0	52

	prinsip efektivitas dan efisiensi.	Nilai	135	96	3	0	0	234
2	Pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.	Frekuensi	27	24	1	0	0	52
		Nilai	135	96	3	0	0	234
3	Pegawai menghasilkan kinerja yang telah mencapai sasaran yang diinginkan organisasi.	Frekuensi	26	25	1	0	0	52
		Nilai	130	100	3	0	0	233
Indikator : Responsivitas								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyusun agenda dan prioritas layanan publik.	Frekuensi	22	30	0	0	0	52
		Nilai	110	120	0	0	0	230
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengenali dan memahami kebutuhan masyarakat.	Frekuensi	21	31	0	0	0	52
		Nilai	105	124	0	0	0	229
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan pelayanan kepada masyarakat secara cermat, tepat dan cepat	Frekuensi	21	30	1	0	0	52
		Nilai	105	120	3	0	0	228
Indikator : Responsibilitas								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerapkan prinsip administrasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan.	Frekuensi	27	25	0	0	0	52
		Nilai	135	100	0	0	0	235
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan.	Frekuensi	26	25	1	0	0	52
		Nilai	130	100	3	0	0	233

3	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan organisasi sesuai prosedur atau kebijakan yang berlaku.	Frekuensi	29	23	0	0	0	52
		Nilai	145	92	0	0	0	237

- a. Pada dimensi Produktivitas terdapat nilai dari Pernyataan Y1.1 dengan total nilai 234, Pernyataan Y1.2 dengan total nilai 234, Pernyataan Y1.3 dengan total nilai 233 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa pegawai selalu melaksanakan kinerja berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan total nilai Y lebih besar dari $> 218,4$ sehingga dapat dinyatakan dimensi Produktivitas dapat dikatakan sangat baik dan dapat melaksanakan kinerja secara efektif dan efisien.
- b. Pada dimensi Responsivitas terdapat nilai dari Pernyataan Y1.4 dengan total nilai 230, Pernyataan Y1.5 dengan total nilai 229, Pernyataan Y1.6 dengan total nilai 228 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa menyusun agenda dan membuat prioritas layanan masyarakat dengan baik. Total nilai Y lebih besar dari $> 218,4$ sehingga dapat dinyatakan bahwa Dimensi Responsivitas dapat dikatakan sangat baik dengan menyusun agenda serta prioritas layanan.
- c. Pada dimensi Responsibilitas terdapat nilai dari Y1.7 dengan total nilai 233, Y1.8 dengan total nilai 227, Y1.9 dengan total nilai 237 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa pernyataan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selalu melaksanakan dan menerapkan administrasi yang baik dan memastikan kepatuhan hukum yang berlaku. Dengan total nilai $> 218,4$ sehingga dapat disimpulkan Kinerja Organisasi, hasil rekapitulasi tanggapan responden menunjukkan bahwa responden menerapkan dimensi responsibilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan menerapkan prinsip – prinsip administrasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk menguji kualitas data dalam hal ini, data memiliki kedudukan yang sangat penting karena uji ini merupakan penggambaran variabel yang teliti akan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, oleh karena itu benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Dilain pihak, benar tidaknya data, bergantung pada baik tidaknya *instrument* data, kuesioner sebagai *instrument* yang baik harus memulai persyaratan *valid* dan reliabel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu program SPSS for windows versi 26.0 untuk menguji data yang diperoleh.

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau *instrument* penelitian. Hasil penelitian yang *valid* bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang *valid* berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu *valid*. *Valid* berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur

Pengujian *valid* atau tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Suatu *instrument* dinyatakan valid apabila korelasi *r* hitung lebih besar pada taraf signifikansi 0,05% atau 5%. Dengan jumlah responden 52 pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Apabila nilai koefisien validitas yang diperoleh > titik kritis 0,273, maka pernyataan tersebut dinyatakan *valid*. Hasil Uji *Good Government Governance*.

Table 4. 11

Hasil Uji Validitas *Good Government Governance* (X)

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
<i>Good Government Governance</i> (X)	X1.1	0,702	0.273	Valid
	X1.2	0,692	0.273	Valid
	X1.3	0,629	0.273	Valid
	X1.4	0,807	0.273	Valid
	X1.5	0,706	0.273	Valid
	X1.6	0,676	0.273	Valid
	X1.7	0,546	0.273	Valid
	X1.8	0,669	0.273	Valid
	X1.9	0,713	0.273	Valid
	X1.10	0,659	0.273	Valid
	X1.11	0,661	0.273	Valid
	X1.12	0,664	0.273	Valid

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Pada Tabel 4.11 diperoleh hasil perhitungan data kuesioner yang sudah diolah melalui SPSS bahwa dari setiap pernyataan sesuai indikator masing – masing yang diberikan kepada 52 orang responden dengan butir pernyataan berjumlah 12 bernilai positif menunjukkan r hitung $>$ r tabel pada taraf 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel *Good Government Governance* (X) sudah *valid* dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat digunakan dalam analisa selanjutnya.

Table 4. 12
Hasil Uji Validitas Kinerja Organisasi (Y)

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kinerja Organisasi (Y)	Y1.1	0,764	0.273	Valid
	Y1.2	0,680	0.273	Valid
	Y1.3	0,746	0.273	Valid
	Y1.4	0,751	0.273	Valid
	Y1.5	0,690	0.273	Valid
	Y1.6	0,799	0.273	Valid
	Y1.7	0,762	0.273	Valid
	Y1.8	0,694	0.273	Valid
	Y1.9	0,681	0.273	Valid

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Pada Tabel 4.11 diperoleh hasil perhitungan data kuesioner yang sudah diolah melalui SPSS bahwa dari setiap pernyataan sesuai indikator masing – masing yang diberikan kepada 52 orang responden dengan butir pernyataan dengan masing-masing butir pernyataan berjumlah 9 bernilai positif menunjukkan r hitung $>$ r tabel pada taraf 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah *valid* dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat digunakan dalam analisa selanjutnya

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran telah konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih dari gejala yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Menurut (Ghozali, 2018) secara umum yang dapat dikatakan reliabel adalah 0,70 dapat diterima dan lebih dari 0,80 itu sangat baik. Selain itu, *Cronbach's Alpha* yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal realibilitas nya.

Table 4. 13**Hasil Uji Reliabilitas Variabel *Good Government Governance* (X)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.889	12

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Pada Tabel 4.13 diperoleh hasil bahwa dari setiap masing masing variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,889 lebih besar dari 0,70 dan dapat dinyatakan sangat reliabel atau sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang diajukan dalam membentuk *Good Government Governance* (X) menunjukkan keandalannya atau dapat dikatakan reliabel.

Table 4. 14**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Organisasi (Y)****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0.890	9

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Pada Tabel 4.13 diperoleh hasil bahwa dari setiap masing masing variabel memiliki nilai hasil Cronbach's Alpha sebesar 0,890 lebih besar dari 0,70 dan dapat dinyatakan sangat reliabel atau sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang diajukan dalam membentuk Kinerja Organisasi (Y) menunjukkan keandalannya atau dapat dikatakan reliabel.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Analisis Regresi Sederhana mengharuskan adanya pengujian terhadap asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan heteroskedastisitas sehingga hasil estimasi regresi yang terbentuk tidak bias.

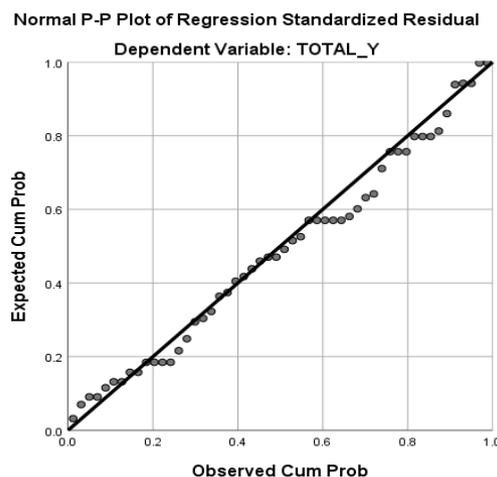
4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk Uji Normalitas yaitu Analisis Grafik dan Analisis Statistik sebagai berikut:

1. Analisis Grafik

Uji Normalitas data dapat dilihat melalui penyebaran titik pada sumbu diagonal dari P-P Plot. Apabila data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Begitupun sebaliknya, apabila titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini adalah gambar grafik untuk P-P plot.



Gambar 4. 3

Hasil Uji Normalitas Analisis Grafik

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Pada Gambar 4.3 diperoleh hasil bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal. Hasil ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal maka model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran asumsi normalitas dapat dilihat dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah tidak normal.

Table 4. 15
Hasil Uji Normalitas Analisis Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.40484685
Most Extreme Differences	Absolute	0.092
	Positive	0.092
	Negative	-0.050
Test Statistic		0.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

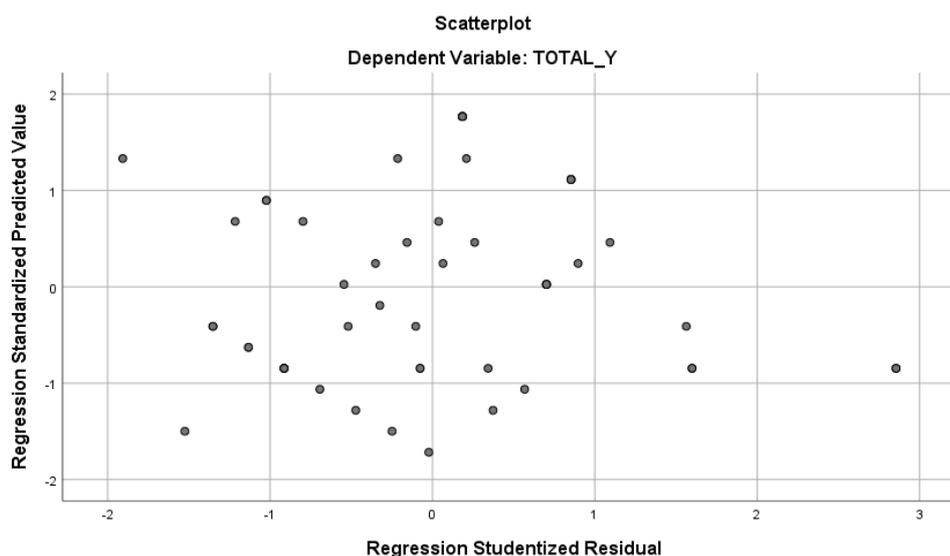
Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Pada Tabel 4.15 diketahui hasil pengujian normalitas data yang disajikan pada tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* $0,200 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki sebaran yang normal. Dengan kata lain asumsi normalitas data terpenuhi.

4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat adanya tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di – *studentized*. Dasar analisis:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point – point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4. 4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Gambar 4.4 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik scatter plot. Dari gambar tersebut terlihat bahwa titik – titik yang diperoleh membentuk pola acak tidak beraturan serta menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, sehingga dalam model regresi yang akan dibentuk tidak ditemukan adanya pelanggaran *heteroskedastisitas*, dengan kata varians residual bersifat homoskedastisitas.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat adanya suatu hubungan dan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel (Y). Analisis regresi pada dasarnya mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, selain itu menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018). Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X$$

Keterangan :

a : Konstanta

Y : Kinerja Organisasi

X : *Good Government Governance*

B : Koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh *Predictor*

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 4. 16
Persamaan Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model				Standardized	T	Sig.
				Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	12.626	3.858		3.273	0.002
	TOTAL_X	0.532	0.074	0.713	7.188	0.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana di atas tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$Y = 12.626 + 0,532X$$

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana di atas tersebut masing – masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 12.626 menunjukkan bahwa ketika pelaksanaan *Good Government Governance* (X) bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka kinerja organisasi diprediksi akan bernilai sebesar 12.626 kali.
- b. Variabel *Good Government Governance* X yaitu pelaksanaan *Good Government Governance* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,532 menunjukkan bahwa ketika pelaksanaan *Good Government Governance*, mengalami kenaikan satu satuan maka Kinerja Organisasi (Y) akan naik sebesar 0,532 atau 53,2% atau koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-T)

Menurut (Ghozali, 2018) Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.

Pengujian hipotesis dilakukan sebagai pembuktian apakah variabel Pelaksanaan *Good Government Governance* (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Organisasi (Y). Perumusan pengujian hipotesis (uji t) adalah sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta = 0$ Pelaksanaan *Good Government Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi
- b. $H_a : \beta \neq 0$ Pelaksanaan *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Organisasi

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, hal ini menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
- Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, hal ini menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

Menentukan nilai t tabel:

- Nilai t tabel didapat dari tabel distribusi t pada taraf signifikansi 5%.
- Nilai derajat bebas untuk pengujian dua pihak (*two tailed*) (db) $(n(52) - k(1) - 1)$ sebesar 50 diperoleh nilai t tabel sebesar $\pm 2,008$

Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut di bawah ini menggunakan program software SPSS versi 26.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 4. 17

Hasil Uji Parsial (Uji – t)

Coefficients ^a						
Model				Standardized Coefficients	t	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	12.626	3.858		3.273	0.002
	TOTAL_X	0.532	0.074	0.713	7.188	0.000

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Dari hasil perhitungan diperoleh t hitung pada variabel *Good Government Governance* terhadap Kinerja Organisasi dimana jika taraf signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sedangkan jika nilai taraf signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Perhitungan yang diperoleh nilai t hitung pada variabel *Good Government Governance* sebesar $7,188 > t$ tabel $2,008$ dan mendapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar $0,000$ maka H_1 diterima karena nilai sig $<$ dari $0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Organisasi (Y) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

4.3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai R-Square. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dalam bentuk persentase. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel output berikut:

Table 4. 18
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	0.508	0.498	2.429

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi atau (R) yang diperoleh sebesar 0,713 Dengan demikian koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100 \%$$

$$Kd = (0,713)^2 \times 100 \%$$

$$Kd = 50,8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 50,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Good Government Governance* memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar 50,8%, sedangkan sisanya sebesar 49,2% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Simultan (Uji – f) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel Independen yaitu *Good Government Governance* (X) terhadap Kinerja Organisasi (Y)

Table 4. 19
Hasil Uji Simultan (Uji – f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304.802	1	304.802	51.671	.000 ^b
	Residual	294.948	50	5.899		
	Total	599.750	51			
a. Dependent Variable: TOTAL_Y						
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X						

Hasil: Sumber Pengolahan Data SPSS 26 (2022)

Pada Tabel diatas diperoleh hasil bahwa nilai Uji F hitung sebesar 51.671 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* (X) berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi (Y) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nurfitriani, 2019) yang berpendapat bahwa *Good Government Governance* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Organisasi.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pelaksanaan *Good Government Governance* Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Pada pelaksanaan *Good Government Governance* Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor jika dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai tanggapan dimensi-dimensi yang membentuk *good government governance* dapat dilihat dari tabel 4.9 Distribusi Jawaban Responden *Good Government Governance*:

- a. Pada dimensi Transparansi terdapat nilai dari Pernyataan X1.1 dengan total nilai 231, Pernyataan X1.2 dengan total nilai 229, Pernyataan X1.3 dengan total nilai 221, dan X1.4 dengan total nilai 222 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selalu mempublikasikan profil, kegiatan-kegiatan, sarana dan prasarana secara akurat dengan total nilai X lebih besar dari $> 218,4$ sehingga dapat dinyatakan bahwa *Good Government Governance* dapat dikatakan sangat baik dan menerapkan prinsip Transparansi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- b. Pada dimensi Partisipasi terdapat nilai dari Pernyataan X1.5 dengan total nilai 214, Pernyataan X1.6 dengan total nilai 209 dan Pernyataan X1.7 dengan total nilai 212 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selalu menerima masukan-masukan dari masyarakat dengan total nilai X lebih besar dari $> 176,8$ sehingga dapat dinyatakan bahwa *Good Government Governance* dapat dikatakan baik dan menerapkan prinsip Partisipasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- c. Pada dimensi Akuntabilitas terdapat nilai dari Pernyataan X1.8 dengan total nilai 233, Pernyataan X1.9 dengan total nilai 227, Pernyataan X1.10 dengan total nilai Pernyataan 231 X1.11 dengan total nilai 233 dan Pernyataan X1.12 dengan total nilai 236 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa pernyataan Keputusan yang diambil selalu memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dengan rata-rata tanggapan responden sebesar dengan total nilai X lebih besar dari $> 218,4$ sehingga dapat dinyatakan bahwa *Good Government Governance* dapat dikatakan sangat baik dan menerapkan prinsip Akuntabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan uraian diatas, nilai total akumulasi Variabel X dari ketiga dimensi yang diatas yaitu Transparansi dan Akuntabilitas lebih besar dari > 218 dan untuk indikator Partisipasi $> 176,8$ sehingga dapat dinyatakan bahwa responden beranggapan telah melaksanakan dan menjalankan *Good Government Governance* dengan sangat baik dan adanya penerapan *Good Government Governance* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang perlu dipertahankan.

Dari hasil di atas dapat diperkuat dengan bukti konkrit yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Pada variabel *Good Government Governance* (X) yaitu:

1. Transparansi

Semakin pesatnya kemajuan teknologi saat ini berdampak pada kebutuhan masyarakat akan sebuah informasi yang cepat dan mudah dalam mendapatkannya, kemajuan teknologi tersebut harus diimbangi dengan pemanfaatannya. Kemudahan dalam mendapatkan sebuah informasi berkat pesatnya perkembangan teknologi informasi di segala bidang, menuntut instansi pemerintah maupun instansi swasta untuk menyediakan sebuah media informasi berbasis teknologi informasi. Dengan adanya media tersebut, instansi pemerintah maupun instansi swasta dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cepat.

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi instansi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor saat ini. Dinas Pendidikan berupaya untuk menghadirkan sebuah media berbasis Online atau Website, dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor berupa sub domain Dinas Pendidikan, yang dapat diakses pada <http://disdik.bogorkab.go.id>.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa segala bentuk program yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dipublikasikan agar diketahui oleh semua masyarakat melalui web resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Prinsip transparansi ini tidak hanya terkait keterbukaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam menerapkan program tetapi juga dalam hal anggaran. Anggaran dana yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ini tersusun dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Laporan ini juga dipublikasikan melalui web resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sehingga masyarakat juga dapat mengetahui terkait anggaran dana yang telah dibuat. Transparansi anggaran menjadi sangat penting karena merupakan hal yang sangat sensitif dan sering dicurigai atau dipertanyakan oleh banyak pihak apabila tidak transparan. Sehingga penyediaan informasi yang akurat tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, keuangan dan tanggung jawab dapat dilihat di website yang sudah disediakan. Dengan adanya subdomain ini, kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai dunia pendidikan Kabupaten Bogor dapat terpenuhi.

2. Partisipasi

Dinas Pendidikan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan ini seperti memberikan sarana atau media bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik maupun saran bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Prinsip partisipasi telah dibuat kotak saran untuk masyarakat memberikan kritik dan saran kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor. Kotak saran berada di depan ruang lobby kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam memberikan saran dan kritiknya. Kotak saran dalam prinsip partisipasi ini merupakan wadah untuk masyarakat berpartisipasi membangun pendidikan yang berkualitas selain itu juga membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memang menerima dan menerapkan prinsip partisipasi. Kotak saran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat membantu masyarakat dalam memberikan masukan.

Sarana atau media yang bisa digunakan oleh masyarakat adalah telepon di nomor (021) 1234 5678 dan e-mail di alamat disdik@bogorkab.go.id Selain itu masyarakat juga bisa datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dengan adanya sarana atau media ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dalam menyampaikan kritik dan saran yang bisa di gunakan oleh Dinas Pendidikan untuk bahan pertimbangan dan evaluasi.

3. Akuntabilitas

Dapat dilihat dari Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020.

Secara keseluruhan sebagian besar sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Pendidikan telah dicapai, yaitu dari 14 (empat belas) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Ada 6 (enam) indikator yang belum terpenuhi. Dengan adanya indikator – indikator yang belum tercapai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dalam prinsip Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah cukup baik namun untuk indikator – indikator yang belum tercapai dan harus diperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

4.4.2 Pelaksanaan Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Pada pelaksanaan kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor jika dilihat dari hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai tanggapan dimensi-dimensi yang membentuk *good government governance* dapat dilihat dari tabel 4.10 Distribusi Jawaban Responden Kinerja Organisasi:

- a. Pada dimensi Produktivitas terdapat nilai dari Pernyataan Y1.1 dengan total nilai 234, Pernyataan Y1.2 dengan total nilai 234, Pernyataan Y1.3 dengan total nilai 233 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa pegawai selalu melaksanakan kinerja berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan total nilai Y lebih besar dari $> 218,4$ sehingga dapat dinyatakan dimensi Produktivitas dapat dikatakan sangat baik dan dapat melaksanakan kinerja secara efektif dan efisien.

- b. Pada dimensi Responsivitas terdapat nilai dari Pernyataan Y1.4 dengan total nilai 230, Pernyataan Y1.5 dengan total nilai 229, Pernyataan Y1.6 dengan total nilai 228 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa menyusun agenda dan membuat prioritas layanan masyarakat dengan baik. Total nilai Y lebih besar dari $> 218,4$ sehingga dapat dinyatakan bahwa Dimensi Responsivitas dapat dikatakan sangat baik dengan menyusun agenda serta prioritas layanan.
- c. Pada dimensi Responsibilitas terdapat nilai dari Y1.7 dengan total nilai 233, Y1.8 dengan total nilai 227, Y1.9 dengan total nilai 237 yang berarti dapat diartikan pada pernyataan bahwa pernyataan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor selalu melaksanakan dan menerapkan administrasi yang baik dan memastikan kepatuhan hukum yang berlaku. Dengan total nilai $> 218,4$ sehingga dapat disimpulkan Kinerja Organisasi, hasil rekapitulasi tanggapan responden menunjukkan bahwa responden menerapkan dimensi responsibilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan menerapkan prinsip – prinsip administrasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, nilai total akumulasi Variabel Y dari ketiga dimensi yang diatas lebih besar dari $> 218,4$ sehingga dapat dinyatakan bahwa responden beranggapan telah melaksanakan dan menjalankan Kinerja Organisasi dengan sangat baik dan adanya penerapan Kinerja Organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor perlu dipertahankan.

Dari hasil di atas dapat diperkuat dengan bukti konkrit yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Pada variabel Kinerja Organisasi (Y) yaitu:

1. Produktivitas

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat melaksanakan kinerja sesuai dengan targetnya. Dari Laporan Kinerja Dinas Pendidikan bahwa hampir semua indikator tercapai namun ada 6 indikator yang belum terpenuhi yaitu indikator Nilai Rata – rata UN SD dan Nilai Rata – rata UN SMP, hal ini dikarenakan ditiadakannya Ujian Nasional melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 terkait peniadaan Ujian Nasional (UN), Ujian Kesetaraan, dan Ujian Sekolah dalam masa darurat COVID – 19. Faktor lainnya yaitu dampak pandemi COVID-19 yang cukup mempengaruhi sektor pendidikan. Dari segi anggaran kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tidak mengalami kekurangan, dimana anggaran yang telah ditetapkan memenuhi kebutuhan target kerja sebelum masa kerja selesai.

2. Responsivitas

Responsivitas kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat dilihat dari kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang memiliki wadah untuk menampung aspirasi, saran dan keluhan masyarakat dengan kemampuan pegawai dalam menanggapi keluhan

dari masyarakat sehingga pegawai memiliki kemampuan dalam memberikan kejelasan.

3. Responsibilitas

Responsibilitas dalam pelaksanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat dilihat dari standar yang menjadi pedoman dalam menjalankan program kerja, organisasi memiliki kemampuan untuk mencapai target atas program kerja serta pegawai mempunyai pemahaman terhadap tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Adanya hubungan kerja sama antar masing – masing pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya perilaku kerja yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta didukung dengan adanya pemberian pelatihan atau training pada masing – masing karyawan sesuai kebutuhan. Program pelatihan training sangat diperlukan oleh pegawai dengan memperoleh pengalaman dan persiapan tantangan kerja dalam menghadapi kondisi penyesuaian inovasi baru dalam membenahi tata kelola manajemen di bidang kerja masing – masing. Hal ini, dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menyikapi permasalahan kegiatan yang direalisasikan di lapangan.

4.4.3 Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t diperoleh keputusan uji menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti *Good Government Governance* berpengaruh signifikansi terhadap Kinerja Organisasi dengan perbandingan t hitung dengan t_{tabel} , $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,188 > 2,008$) dan dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hipotesis yang diajukan diterima yaitu *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan analisis bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hal ini memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk fokus memperhatikan *good government governance* yang dijalankan karena secara empiris penelitian telah berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dalam memberikan kontribusi pengaruh *good government governance* terhadap kinerja organisasi 52 sebesar 50,8% sedangkan sisanya 49,2% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain diluar model penelitian ini. Berdasarkan nilai koefisien korelasi (R) dapat dilihat bahwa keeratan hubungan antara *good government governance* dengan Kinerja Organisasi sebesar 0,508 dan masuk dalam kategori “kuat”. Arah hubungan positif antara *Good Government Governance* dengan Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa *Good Government Governance* yang semakin baik akan diikuti dengan peningkatan Kinerja Organisasi.

Good Government Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (BPKP, 2010) *Good Government Governance* terdiri dari dimensi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Dari ketiga dimensi menunjukkan hasil tanggapan responden mengenai *good government governance* ke dalam kategori yang sangat baik. Artinya *good government governance* yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sudah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya menunjukkan (Setiadi et al., 2015) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dari prinsip-prinsip *good governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado dapat teruji dan dapat diterima secara empiris. Karena apabila *pelaksanaan Good Government Governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya hasil penelitian (Claudya, 2020) pengaruh *good government governance* terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah berjalan dengan baik bahwa jawaban dari responden hampir semua menyetujui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah menerapkan *good government governance* dan kinerja organisasi sudah berjalan dengan cukup baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat membuat kesimpulan mengenai Pelaksanaan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. *Good Government Governance* di Dinas Kabupaten Bogor sudah tergolong baik, meskipun masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan indikator Akuntabilitas dan masih dapat diperbaiki atau ditingkatkan kembali.
2. Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada saat ini tergolong baik, meskipun demikian masih terdapat permasalahan di lapangan yang perlu diperbaiki kembali kedepannya seperti halnya yang berkaitan dengan indikator kinerja produktivitas, responsivitas dan tanggung jawab.
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Good Government Governance* memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,05$ atau $(0,000 < 0,05)$ dan nilai t tabel lebih besar dari t hitung $(7,188 > 2,00856)$. Sehingga dapat dibuktikan bahwa *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pelaksanaan *Good Government Governance* terhadap Kinerja Organisasi. Hasil penelitian ini pun menunjukkan meskipun pelaksanaan *good government governance* termasuk ke dalam kategori sangat baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus dibenahi pada masing – masing variabel. Maka penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak – pihak terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
Disarankan untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yaitu pada indikator Transparansi agar lebih banyak menampung aspirasi dari masyarakat melalui media massa atau publik, serta dapat memberikan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi yang

membutuhkan data tersebut. Partisipasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tidak hanya dilihat dari sebatas sebagai keterlibatan saja, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus lebih melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Selanjutnya untuk indikator akuntabilitas membuktikan bahwa masih banyak indikator yang belum tercapai dan masih belum optimal dalam melakukan kinerjanya terhadap publik, sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang masih harus diperbaiki untuk meningkatkan mutu kualitas indikator kinerja tersebut.

2. Disarankan untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada pada Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yaitu Produktivitas diharapkan sebaiknya menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai melalui program pelatihan secara berkala, sebaliknya pimpinan perlu mengefektifkan fungsi pengawasan serta pemberian *reward* dan *punishment* yang objektif kepada pegawai, sehingga pegawai menjadi lebih baik dalam mengoptimalkan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan pada masa yang akan datang. Responsivitas perlu ditingkatkan dengan cara lebih mengenali kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Responsibilitas pun perlu ditingkatkan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawaban kegiatan kerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian mengenai kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena adanya tuntutan dari publik terhadap pemerintah untuk meningkatkan *Good Government Governance*. Maka disarankan sebagai bahan acuan kedepannya dalam penelitian mengenai Pemerintahan Kota/Kabupaten lain yang memiliki kinerja pegawai yang belum maksimal. Selain itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai selain *Good Government Governance*. Agar hasil penelitian dapat digunakan secara luas maka objek penelitian tidak hanya dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, S. (2018). *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi) NIP : Universitas Widyatama.*
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (S. Saat (ed.); 07 ed.). Erlangga.
- Bastian, I. (2016). Sistem Akuntansi Sektor Publik. In *Lingkup Akuntansi Sektor Publik.*
- BPKP, L. (2010). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.* Lembaga Administrasi Negara dan BPK.
- Cahyadi, A. (2017). Penerapan *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis *Good Governance* Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1255>
- Candra, A. (2018). Good Corporate Governance, Conservatism Accounting, Real Earnings Management, And Information Asymmetry On Share Return. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 9–18.
- Claudia, J. B. (2020). *Pengaruh good governance dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten ketapang dengan akuntabilitas publik sebagai variabel mediasi.* http://e-journal.uajy.ac.id/22530/1/0422833_0.pdf
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (4 (Terbaru)).
- Edison. (2018). *Metode Penelitian Bisnis.* Cendra.
- Firmansyah, I., & Rahmawati, P. D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Value for Money terhadap Good Government Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. *Competitive*, 15(1), 60–74. <https://doi.org/10.36618/competitive.v15i1.678>
- Fitriyah, N., Indrayono, Y., & Dessy, H. (2019). Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor. *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan, Bogor*, 13.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutapea, F. L., & Widyaningsih, A. (2017). *Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)*. 9(1), 173–186.
- Irtanto. (2020). Kinerja Birokrasi Pelayanan Sektor Publik: Perspektif Perkembangan Teori. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 14(2), 153–171. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.354>
- Mahsun. (2015). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). BPFE.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan.* Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI.
- Maryam, N. S. (2016). JIPSi. In *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik: Vol. VI* (Issue 1).
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (M. N. Muliawati (ed.)). PT Remaja Rosdakarya.

- Neni, Nurlela, Karlina, S. (2021). Analisis pertanggungjawaban alokasi dana desa dengan pendekatan good governance. *Pionir LPPM Universitas Asahan*, 7, 73.
- Nurfritriani, A. (2019). *Pengaruh pelaksanaan good government*.
- Nurhazizal M, Y. M. B. & A. N. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Pemerintah Desa: *Good Governance* Sebagai Pemediasi. *Jurnal Akuntansi*, 8.
- Nuryaman, & Christina, V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia.
- Panjaitan, S. A. (2015). *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Organisasi Dilihat dari Persepsi Pegawai*.
- Prayoga, M. A. (2017). Pengaruh Good Governance, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 90–104.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2015). JEAM Vol XI No. 1/2012 1. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, XI(1), 1–19.
- Saribu, A. D., & Serdang, K. D. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengeloan. *Internasional & Nasional*, 20(1), 91–108.
- Setiadi, A., KIYAI, B., & RURU, J. (2015). Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Suatu Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Manado). *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 1(010), 1255.
- Setiawan, I. N. (2016). *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Pada Departemen Jaringan Pt Pln (Persero) Area Surabaya Utara Indra Novri Setiawan Jurusan Manajemen , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya , Kampus Ketintang Surabaya 60. 1.*
- Suaib, R. M. (2018). Pelayanan, Studi Sipil, Catatan Sorong, Kota. *NOKEN 3 (2)*, 3(2), 1–10.
- Sugiyono. (2018). *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Terbaru). Alfabeta Bandung.
- Temalagi, L. (2015). No Title. *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 22.0*.
- Wulan Dary, N. (2020). Akuntansi f akultas sosial. In *Akuntansi*.
- Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh *Good Government Governance*, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 434. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p17>
- Zaharuddin, Supriyadi, S. W. (2021). *Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi* (Moh.Nasrudin (ed.); 1st ed.). PT. Nasya Expanding Management.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adela Septiani Simbolon
Alamat : Griya Bukit Jaya Blok B.5 No 6 RT11/25, Ds. Tlajung
Udik, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 27 September 1999
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan
• SD : SDN Gunung Putri 05
• SMP : SMPN 1 Citeureup
• SMA : SMK Yadika 11 Jatirangga, Bekasi
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Mei 2022
Peneliti,

(Adela Septiani Simbolon)

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SI Manajemen "Terakreditasi A" SI Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 691 /WD.1/FEB-UP/VIII/2021 23 Agustus 2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Jl. Nyaman No.1, Tengah Cibinong
Bogor Jawa Barat 16914.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Adela Septiani Simbolon
NPM : 022118207
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).



Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id



Universitas Pakuan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 691 /WD.1/FEB-UP/VIII/2021
Lampiran :
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

23 Agustus 2021

Kepada : Yth. Pimpinan
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BOGOR
Jl. KSR Dedi Kusmayadi No.41, Tengah Cibinong
Bogor Jawa Barat 16914.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Adela Septiani Simbolon
NPM : 022118207
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).

Lampiran 2 : Jawaban Persetujuan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

Cibinong, 26 Agustus 2021

Nomor : 070 / 1445 - Bakesbangpol
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bogor
 Di
 Cibinong

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Menimbang :

Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Nomor : 691/WD.1/FEB-UP/VIII.2021, Tanggal 23 Agustus 2021. Perihal Permohonan Riset/Magang/Data.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada:

Nama : Adela Septiani Simbolon
 Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143
 Penanggung Jawab : Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.
 Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
 Waktu : 27 Agustus 2021 s.d 27 November 2021
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian atau Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Lampiran 3 : Surat Izin Penyebaran Kuesioner



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 065 /WD.1/FEB-UP/I/2022 21 Januari 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian / Wawancara / Kuesioner

Kepada : Yth. Pimpinan
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
 Jl. Nyaman No.1 Tangah Cibinong
 Bogor Jawa Barat 16914.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk menyebarkan kuesioner pada kantor dinas/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Adelia Septiani Simbolon
 NPM : 022118207
 Jurusan : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :
 1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);
 2. Arsip.

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkeonomi@unpak.ac.id

Lampiran 4 : Surat Jawaban Penyebaran Kuesioner



Universitas Pakuan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"
Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hanting)

Nomor : 065 /WD.1/FEB-UP/1/2022 26 Januari 2022
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian / Wawancara / Kuesioner

Kepada : Yth. Pimpinan
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
 Jl. Nyaman No 1 Tengah Cibinong
 Bogor Jawa Barat 16914.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk menyebarkan kuesioner pada kantor dinas/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

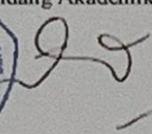
Nama Mahasiswa : Adela Septiani Simbolon
 NPM : 022118207
 Jurusan : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



42/230

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan




Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);
2. Arsip

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : febkonomi@unpak.ac.id

Lampiran 5 : Angket Penelitian

KUESIONER PENELITIAN
“PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR”

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Atas kesediaan waktunya saya ucapkan terima kasih.

DATA RESPONDEN

Jenis kelamin : P / L

Usia saat ini : tahun

Bidang :

Pendidikan Terakhir :

Lama Bekerja : tahun

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda **checklist (X)** pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pernyataan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihlah jawaban untuk setiap pernyataan:

1. Jika jawaban anda “Sangat Setuju” (SS)
2. Jika jawaban anda “Setuju” (S)
3. Jika jawaban anda “Netral” (N)
4. Jika jawaban anda “Tidak Setuju” (TS)
5. Jika jawaban anda “Sangat Tidak Setuju” (STS)

Variabel *Good Government Governance* (X)

No	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	N	TS	STS
Indikator : Transparansi						
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mempublikasikan profile, kegiatan, sarana dan prasarana serta jasa/pelayanan secara akurat.					
2.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan mengakses informasi.					
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyediakan sarana untuk masyarakat mengajukan saran atau keluhan.					

4.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memberikan informasi yang dapat diakses pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal.					
Indikator : Partisipasi						
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyediakan forum untuk menampung partisipasi masyarakat melalui media massa atau diskusi publik.					
2.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat kebijakan selalu melibatkan masyarakat.					
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuka diri bagi masyarakat untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan masukan.					
Indikator : Akuntabilitas						
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat keputusan secara tertulis, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.					
2.	Pegawai melaksanakan tugas berupa laporan keuangan dan program yang dilakukan secara berkala.					
3.	Pegawai melaksanakan pertanggungjawaban berupa laporan tahunan keuangan dan program yang dilakukan secara berkala.					
4.	Pegawai melaksanakan kinerja sesuai jumlah perencanaan, pelaksanaan program dan hasil.					
5.	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program organisasi yang telah dilakukan.					

Variabel : Kinerja Organisasi (Y)

No	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	N	TS	STS
Indikator : Produktivitas						
1.	Pegawai melaksanakan kinerja berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi.					

5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	55
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	54
4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	52
5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	51
4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	50
5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	54
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	57
4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	53
4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	52
5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	55

Kinerja Organisasi (Y)

Kinerja Organisasi (Y)									TOTAL Y
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	4	5	5	5	4	4	4	5	40
4	4	5	5	5	4	4	4	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	4	4	5	5	5	43
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	4	4	4	5	5	5	5	42
4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	4	5	5	5	40
5	4	4	4	4	4	4	5	5	39
5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
5	5	5	5	4	4	5	5	5	43
5	5	5	4	4	5	5	5	4	42

3	5	5	4	4	4	4	3	4	36
5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
4	5	5	4	4	4	5	4	4	39
4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	4	5	5	4	4	5	5	5	42
5	5	5	4	4	5	5	5	5	43
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	5	4	4	4	5	4	4	5	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	5	4	5	5	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	4	4	5	5	4	5	5	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	5	5	4	4	5	5	5	42
5	5	4	5	4	4	4	4	4	39
4	5	4	4	5	4	4	5	4	39
4	4	4	5	5	5	5	5	4	41
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	5	4	5	5	5	5	4	4	41
5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
4	5	5	5	5	5	4	4	5	42

Lampiran 7 : Hasil Uji SPSS

**Hasil Uji Analisis Deskriptif
Statistics**

		TOTAL_X	TOTAL_Y
N	Valid	52	52
	Missing	0	0
Mean		51.88	40.25
Median		51.50	40.00
Mode		48	36
Std. Deviation		4.592	3.429
Variance		21.084	11.760
Range		16	12
Minimum		44	33
Maximum		60	45
Sum		2698	2093

Good Government Governance (X)

No	Pernyataan Variabel <i>Good Government Governance (X)</i>	Pilihan					Total	
		SS	S	N	TS	STS		
		5	4	3	2	1		
Indikator : Transparansi								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mempublikasikan profile, kegiatan, sarana dan prasarana serta jasa / pelayanan secara akurat.	Frekuensi	24	27	1	0	0	52
		Nilai	120	108	3	0	0	231
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan mengakses informasi.	Frekuensi	22	29	1	0	0	52
		Nilai	110	116	3	0	0	229
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyediakan sarana untuk masyarakat mengajukan saran atau keluhan.	Frekuensi	15	35	2	0	0	52
		Nilai	75	140	6	0	0	221
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memberikan informasi yang dapat diakses pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal.	Frekuensi	17	32	3	0	0	52
		Nilai	85	128	9	0	0	222
Indikator : Partisipasi								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyediakan forum untuk menampung partisipasi masyarakat melalui media massa atau diskusi publik.	Frekuensi	12	35	4	1	0	52
		Nilai	60	140	12	2	0	214
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat kebijakan selalu melibatkan masyarakat.	Frekuensi	13	28	10	1	0	52
		Nilai	65	112	30	2	0	209
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuka diri bagi	Frekuensi	12	33	6	1	0	52

	masyarakat untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan masukan.	Nilai	60	132	18	2	0	212
Indikator : Akuntabilitas								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuat keputusan secara tertulis, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.	Frekuensi	26	25	1	0	0	52
		Nilai	130	100	3	0	0	233
2	Pegawai melaksanakan tugas berupa laporan keuangan dan program yang dilakukan secara berkala.	Frekuensi	19	33	0	0	0	52
		Nilai	95	132	0	0	0	227
3	Pegawai melaksanakan pertanggungjawaban berupa laporan tahunan keuangan dan program yang dilakukan secara berkala.	Frekuensi	25	25	2	0	0	52
		Nilai	125	100	6	0	0	231
4	Pegawai melaksanakan kinerja sesuai jumlah perencanaan, pelaksanaan program dan hasil.	Frekuensi	26	25	1	0	0	52
		Nilai	130	100	3	0	0	233
5	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program organisasi yang telah dilakukan.	Frekuensi	28	24	0	0	0	52
		Nilai	140	96	0	0	0	236

Kinerja Organisasi (Y)

No	Pernyataan Kinerja Organisasi (Y)		Pilihan					Total
			SS	S	N	TS	STS	
Indikator : Produktivitas			5	4	3	2	1	
1	Pegawai melaksanakan kinerja berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi.	Frekuensi	27	24	1	0	0	52
		Nilai	135	96	3	0	0	234
2	Pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.	Frekuensi	27	24	1	0	0	52
		Nilai	135	96	3	0	0	234

3	Pegawai menghasilkan kinerja yang telah mencapai sasaran yang diinginkan organisasi.	Frekuensi	26	25	1	0	0	52
		Nilai	130	100	3	0	0	233
Indikator : Responsivitas								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyusun agenda dan prioritas layanan publik.	Frekuensi	22	30	0	0	0	52
		Nilai	110	120	0	0	0	230
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mengenali dan memahami kebutuhan masyarakat.	Frekuensi	21	31	0	0	0	52
		Nilai	105	124	0	0	0	229
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan pelayanan kepada masyarakat secara cermat, tepat dan cepat	Frekuensi	21	30	1	0	0	52
		Nilai	105	120	3	0	0	228
Indikator : Responsibilitas								
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerapkan prinsip administrasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan.	Frekuensi	27	25	0	0	0	52
		Nilai	135	100	0	0	0	235
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan.	Frekuensi	26	25	1	0	0	52
		Nilai	130	100	3	0	0	233
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan organisasi sesuai prosedur atau kebijakan yang berlaku.	Frekuensi	29	23	0	0	0	52
		Nilai	145	92	0	0	0	237

Hasil Uji Validitas *Good Government Governance* (X)

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
<i>Good Government Governance</i> (X)	X1.1	0,702	0.273	Valid
	X1.2	0,692	0.273	Valid
	X1.3	0,629	0.273	Valid
	X1.4	0,807	0.273	Valid
	X1.5	0,706	0.273	Valid
	X1.6	0,676	0.273	Valid
	X1.7	0,546	0.273	Valid
	X1.8	0,669	0.273	Valid
	X1.9	0,713	0.273	Valid
	X1.10	0,659	0.273	Valid
	X1.11	0,661	0.273	Valid
	X1.12	0,664	0.273	Valid

Hasil Uji Validitas *Kinerja Organisasi* (Y)

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
<i>Kinerja Organisasi</i> (Y)	Y1.1	0,764	0.273	Valid
	Y1.2	0,680	0.273	Valid
	Y1.3	0,746	0.273	Valid
	Y1.4	0,751	0.273	Valid
	Y1.5	0,690	0.273	Valid
	Y1.6	0,799	0.273	Valid
	Y1.7	0,762	0.273	Valid
	Y1.8	0,694	0.273	Valid
	Y1.9	0,681	0.273	Valid

Hasil Uji Reliabilitas Variabel *Good Government Governance* (X)

Reliability Statistics

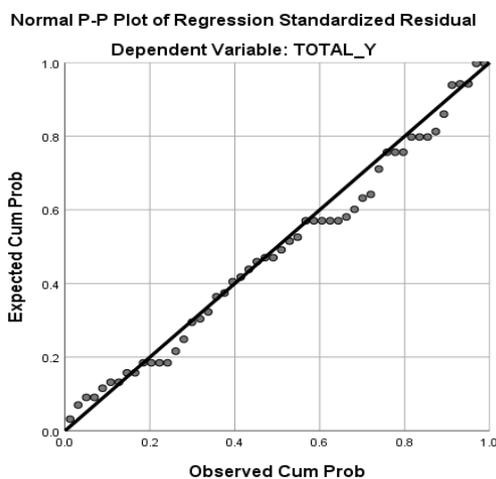
Cronbach's Alpha	N of Items
.889	12

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Organisasi (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.890	9

Hasil Uji Normalitas Analisis Grafik

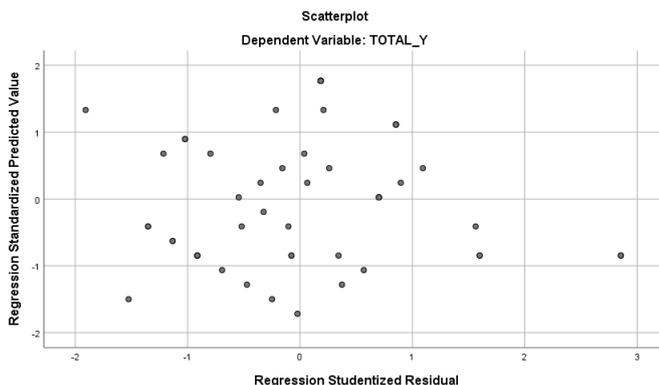


Hasil Uji Normalitas Analisis Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.40484685
Most Extreme Differences	Absolute	0.092
	Positive	0.092
	Negative	-0.050
Test Statistic		0.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hasil Uji Heterokedastisitas



Persamaan Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model				Standardized Coefficients	t	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	12.626	3.858		3.273	0.002
	TOTAL_X	0.532	0.074	0.713	7.188	0.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Hasil Uji Parsial (Uji – t)

Coefficients ^a						
Model				Standardized Coefficients	t	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	12.626	3.858		3.273	0.002
	TOTAL_X	0.532	0.074	0.713	7.188	0.000

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	0.508	0.498	2.429

Hasil Uji Simultan (Uji – f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	304.802	1	304.802	51.671	.000 ^b
	Residual	294.948	50	5.899		
	Total	599.750	51			
a. Dependent Variable: TOTAL_Y						
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X						

Lampiran 8 : Dokumentasi Penyebaran Kuesioner pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor



